

MARDALENA, S.E., M.Si. | DR. SITI ROHIMA, M.Si.  
Drs. HARUNURRASYID, M.Com.  
DIAH AYU FATMAWATI, S.E. | PUTRI ADELIA, S.E.

# **KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI INDONESIA**



# KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI INDONESIA

MARDALENA, S.E, M.Si

DR. SITI ROHIMA, M.Si

Drs. HARUNURRASYID, M.Com

DAH AYU FATMAWATI, S.E

PUTRI ADELIA, S.E



## UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4:**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26:**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar, dan
- penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113:**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI INDONESIA**

**Mardalena, S.E, M.Si  
Dr. Siti Rohima, M.Si  
Drs. Harunurrasyid, M.Com  
Diah Ayu Fatmawati, S.E  
Putri Adelia, S.E**

**UPT. Penerbit dan Percetakan  
Universitas Sriwijaya 2023  
Kampus Unsri Palembang  
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139  
Telp. 0711-360969  
email : [unsri.press@yahoo.com](mailto:unsri.press@yahoo.com), [penerbitunsri@gmail.com](mailto:penerbitunsri@gmail.com)  
website : [www.unsri.unsripress.ac.id](http://www.unsri.unsripress.ac.id)**

**Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021  
Anggota IKAPI No. 001/SMS/96**

**125 halaman : 16 x 24 cm**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.**

**Hak Terbit Pada Unsri Press**

**ISBN : 978-623-399-201-5**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari skema keilmuan yang membahas tentang pemodelan kemiskinan multidimensional di perdesaan dan perkotaan Indonesia. Kajian pemodelan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di seluruh Provinsi di Indonesia hingga saat ini menjadi kajian yang menarik untuk dibahas karena masih menjadi masalah laten bagi semua negara di dunia, terutama Indonesia yang tergolong negara berkembang dengan banyak upaya program pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Buku ini diinisiasi dengan kesadaran akan pentingnya kajian mendalam mengenai kemiskinan multidimensional (dimensi ekonomi, pendidikan dan tenaga kerja) dalam konteks pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta sumbangsuhnya selama proses penulisan buku ini. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi positif bagi masyarakat, negara, dan dunia pada umumnya

Palembang, 14 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II TEORI DAN KONSEP</b> .....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1. Definisi Kemiskinan .....	6
2.1.2. Ukuran-ukuran Kemiskinan.....	7
2.1.3. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan .....	10
<b>BAB III METODE METODE PEMODELAN KEMISKINAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (GWR)</b> .....	12
<b>BAB IV PENDUDUK MISKIN DAN INDIKATOR KEMISKINAN</b> .....	17
4.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	17
4.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	21
4.3 Perkembangan Belanja Modal di Indonesia Tahun 2010-2020. .....	27
4.4 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	30
4.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	33

4.6 Perkembangan Pertumbuhan Produk Regional Bruto Menurut Atas Harga Dasar Konstan di Indonesia Tahun 2010-2020....	37
--	----

**BAB V KONDISI KEMISKINAN DESA DAN KOTA DI INDONESIA (METODE GWR).....40**

5.1 Hasil Perbandingan Model di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	40
5.2 Penentuan Bandwidth Selection di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	47
5.3 Estimasi Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	51
5.4 Pengujian Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	57
5.5 Pengujian Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	68
5.6 Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020 .....	81

**BAB VI DETERMINASI PENDUDUK MISKIN DESA DAN KOTA DI INDONESIA.....93**

6.1 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia .....	93
6.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia .....	98

6.3 Pengaruh Angka Partisipasi Murni SMA/MA Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia .....	103
6.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia .....	107
6.5 Pengaruh Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>IDENTITAS PENULIS</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan Indonesia 2001-2020.....	4
Tabel 2.1 Jenis Indeks dan Indikator Kemiskinan .....	9
Tabel 4. 1 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010 .....	40
Tabel 4.2 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015 .....	41
Tabel 4.3 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020 .....	42
Tabel 4.4 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010.....	43
Tabel 4.5 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015.....	45
Tabel 4.6 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020.....	46
Tabel 4.7 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2010 .....	48
Tabel 4.8 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2015 .....	48

Tabel 4.9 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020.....	49
Tabel 4.10 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010.....	49
Tabel 4.11 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015.....	49
Tabel 4.12 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020.....	50
Tabel 5.1 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010.....	51
Tabel 5.2 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015.....	52
Tabel 5.3 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020.....	53
Tabel 5.4 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010.....	54
Tabel 5.5 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015.....	55
Tabel 5.6 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020.....	56
Tabel 5.7 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010.....	58

Tabel 5.8 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015 .....	60
Tabel 5.9 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020 .....	61
Tabel 5.10 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010 .....	62
Tabel 5.11 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015 .....	63
Tabel 5.12 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020 .....	64
Tabel 5.13 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010.....	66
Tabel 5.14 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010 .....	69
Tabel 5.15 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015.....	70
Tabel 5.16 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015 .....	71
Tabel 5.17 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020.....	72
Tabel 5.18 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010.....	73
Tabel 5.19 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010 .....	74
Tabel 5.20 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015.....	75

Tabel 5.21 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015 .....	76
Tabel 5.22 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020.....	77
Tabel 5.23 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020 .....	78
Tabel 5.24 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010 .....	79
Tabel 5.25 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015 .....	80
Tabel 5.26 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020 .....	81
Tabel 5.27 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010 .....	83
Tabel 5.28 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015 .....	85
Tabel 5.29 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020 .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Indonesia, 2001-2020.....	3
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan .....	18
Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan .....	19
Gambar 4.3 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan .....	22
Gambar 4.4 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan .....	25
Gambar 4.5 Realisasi Belanja Modal Wilayah Perdesaan Indonesia .	28
Gambar 4.6 Realisasi Belanja Modal Wilayah Perkotaan Indonesia..	29
Gambar 4.7 Belanja Bantuan Sosial Wilayah Perdesaan Indonesia ...	30
Gambar 4.8 Belanja Bantuan Sosial di Wilayah Perkotaan Indonesia	32
Gambar 4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perdesaan	34
Gambar 4.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perkotaan	35
Gambar 4.11 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perdesaan Indonesia.....	37
Gambar 4.12 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perkotaan Indonesia.....	39



# 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global di dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia diperlukan perangkat lain seperti Human Development Index (HDI) karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat harusnya mengarah pada pengurangan kemiskinan. Namun, di Indonesia pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki pola yang tidak diikuti dengan pengurangan kemiskinan (un pro-poor atau inklusif). (Sri, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Konsep pengukuran tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS, antara lain: Garis Kemiskinan (GK) yang diukur melalui rata-rata pengeluaran perkapita penduduk per bulan harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari, dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang diukur melalui pemenuhan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.



Paket komoditi kebutuhan dasar makanan dalam hal ini diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Menelaah lebih mendalam mengenai faktor penyebab kemiskinan dapat memberikan arah yang jelas dalam penetapan sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan.

Setiap daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari permasalahan kemiskinan. Hampir semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah daerah ditujukan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang menjadi Provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.572,72 (ribu jiwa), kemudian disusul dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori tiga besar Provinsi Termiskin di Indonesia.



**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan  
Indonesia, 2001-2020**

*Sumber: BPS data diolah 2021*

Berdasarkan gambar terlihat bawasannya jumlah penduduk miskin diperdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk dan upah yang diterima, serta ketersediaan sarana- prasarana lainnya yang ada di perdesaan. Lebih lanjut, berikut adalah tabel kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia.





**Tabel 1. 1 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan Indonesia 2001-2020**

Indeks Keparahan Kemiskinan	Wilayah		
	Perdesaan	Perkotaan	Total
2001	1.36	0.45	0.97
2002	0.85	0.71	0.79
2003	0.93	0.74	0.85
2004	0.90	0.58	0.78
2005	0.89	0.60	0.76
2006	1.22	0.77	1.00
2007	1.09	0.57	0.84
2008	0.95	0.56	0.76
2009	0.82	0.52	0.68
2010	0.75	0.40	0.58
2011	0.68	0.39	0.53
2012	0.61	0.36	0.48
2013	0.60	0.37	0.48
2014	0.57	0.31	0.44
2015	0.67	0.36	0.51
2016	0.59	0.29	0.44
2017	0.65	0.30	0.46
2018	0.62	0.25	0.41
2019	0.53	0.23	0.36
2020	0.68	0.31	0.47

Indeks Kedalaman Kemiskinan	Wilayah		
	Perdesaan	Perkotaan	Total
2001	4.68	1.74	3.42
2002	3.34	2.59	3.01
2003	3.53	2.55	3.13
2004	3.43	2.18	2.89
2005	3.34	2.05	2.78
2006	4.22	2.61	3.43
2007	3.78	2.15	2.99
2008	3.42	2.07	2.77
2009	3.05	1.91	2.50
2010	2.80	1.57	2.21
2011	2.61	1.48	2.05
2012	2.42	1.38	1.90
2013	2.37	1.41	1.89
2014	2.25	1.25	1.75
2015	2.40	1.29	1.84
2016	2.32	1.21	1.74
2017	2.43	1.24	1.79
2018	2.32	1.08	1.63
2019	2.11	1.02	1.50
2020	2.39	1.26	1.75



Berdasarkan tabel keparahan dan kedalaman kemiskinan di atas terlihat bahwasannya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di perkotaan/perdesaan di Indonesia tidak terlalu parah namun tetap perlu dilakukan kontrol pada setiap variabel laten yang mempengaruhi besaran tingkat kemiskinan.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin baik secara global di Indonesia maupun secara mikro per provinsi sudah banyak dilakukan. Fajriyah dan Rahayu (2016:Vol.5,No.1) melakukan analisa pemodelan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan regresi data panel mengemukakan bahwasannya variabel prediktor yang signifikan antara lain: melek huruf, partisipasi angkatan kerja, penduduk yang bekerja di sektor pertanian, serta PDRB per kapita. Sementara itu, variabel prediktor yang sama-sama tidak berpengaruh pada variabel respon adalah penduduk tanpa akses kesehatan. Lebih lanjut, penelitian terkait pemodelan kemiskinan dilakukan oleh Zahdiyaty dan Kaluge (2017:27-31) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan.

Berbeda, dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinta, 2020) menunjukkan bahwa pendidikan, pendidikan di pedesaan, dan pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Sementara itu, pendidikan di perkotaan, pengangguran di perkotaan dan pengangguran di pedesaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.



# 2

## TEORI DAN KONSEP

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.



Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: (1) kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburinya kemiskinan.

### **2.1.2 Ukuran-Ukuran Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan.



Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin. Menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasioanl (BKKBN, 2010) mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria, yaitu :

- a) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen minimal 80%, dan berobat ke puskesmas bila sakit.
- b) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telur/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter persegi per anggota keluarga, tidak ada keluarga umur 10 tahun samapai 60 tahun yang buta huruf, semua anak yang berusia 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga memiliki penghasilan yang tetap atau rutin, dan tidak ada yang sakit dalam tiga bulan.

Selain itu, model pembangunan manusia dari UNDP juga digunakan sebagai ukuran kemiskinan di Indonesia. Secara berkala setiap tiga tahun sejak tahun 1991 mempublikasikan Laporan Pembangunan Manusia atau *Human Development Report* (HDR). Pendekatan pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan-pendekatan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber



daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pertumbuhan ekonomi hanya mengejar peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pendekatan pembangunan sumber daya manusia menjadikan manusia sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada sebagai tujuan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. HDR berisi penjelasan tentang empat indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Empowerment Measure* (GEM) dan Indeks Kemiskinan Manusia atau *Human Poverty Index* (HPI). Di Indonesia, HDR menggunakan data BPS, terutama data Susenas, sehingga memiliki unit survei yang sama dengan BPS yaitu rumah tangga.

**Tabel 2. 1 Jenis Indeks dan Indikator Kemiskinan**

Jenis Indeks	Indikator
HDI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat harapan hidup</li><li>• Tingkat melek hidup orang dewasa</li><li>• Rata-rata lama bersekolah</li><li>• Tingkat daya beli per kapita</li></ul>
HPI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun</li><li>• Tingkat buta huruf orang dewasa</li><li>• Presentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan</li><li>• Presentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan</li></ul>
GDI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan</li><li>• Tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan</li><li>• Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan</li><li>• Perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan</li></ul>
GEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan</li></ul>

Sumber: Cahyat (2004)



### 2.1.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2006) sebagai berikut :

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berate produktivitasnya juga akan rendah, upahnya nya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul karena adanya akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, redahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (*A country is poor because is poor*).



Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal.

Kedua faktor itu di Negara berkembang tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan permintaan modal. Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.



# 3

## METODE PEMODELAN KEMISKINAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION(GWR)

Model GWR adalah pengembangan dari model regresi dimana setiap parameter dihitung pada setiap lokasi pengamatan, sehingga setiap lokasi pengamatan mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda. Model GWR merupakan pengembangan dari model regresi global dimana ide dasarnya diambil dari regresi non parametrik. Variabel respon  $Y$  dalam model GWR diprediksi dengan variabel prediktor yang masing-masing koefisien regresinya bergantung pada lokasi dimana data tersebut diamati. Model GWR dapat ditulis sebagaiberikut :

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i) X_{ik} + \varepsilon_i$$

Keterangan :

$y_i$  = Nilai observasi variabel respon untuk lokasi ke- $i$

$(u_i, v_i)$  = Koordinat letak geografis (longitude, latitude) dari lokasi pengamatan ke- $i$

$\beta_k(u_i, v_i)$  = Koefisien regresi variabel prediktor ke- $k$  pada lokasi pengamatan ke- $i$

$X_k$  = Nilai observasi variabel prekditor ke-  $k$  pada lokasi pengamatan ke- $i$



$\varepsilon_i$  = error pengamatan ke- $i$  dengan  $\varepsilon \sim \text{IIDN}(0, \sigma^2)$

Perbandingan model GWR dengan model regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah model GWR atau model regresi linier berganda yang sesuai dalam memodelkan presentase penduduk miskin di Indonesia. Untuk melihat model yang terbaik dapat dilakukan dengan melihat nilai jumlah kuadrat galat terkecil, nilai  $R^2$  yang terbedar dan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) yang terkecil (Fotheringham *et al.* 2002). Perhitungan nilai AIC untuk model GWR dapat dituliskan sebagai berikut (Fotheringham *et al.* 2002):

$$= 2(\hat{\sigma}) + n \ln(2\pi) + n + \text{tr}(\mathbf{S})$$

dimana:

$$\pi = 3.14$$

$$n = \text{Banyak Sampel}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{(\mathbf{y}^T(\mathbf{I} - \mathbf{S})^T(\mathbf{I} - \mathbf{S})\mathbf{y}) /$$

$$\mathbf{S} = (\mathbf{x}_i[\mathbf{X}^T\mathbf{W}(u_i, v_i)\mathbf{X}]^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{W}(u_i, v_i))$$

$(u_i, v_i)$  = matriks pembobot wilayah amatan ke- $i$  berukuran  $(n \times n)$

$$p = \text{jumlah variabel penjelas}$$

*Bandwidth* diartikan sebagai *radius* dari titik lokasi pusat sebagai acuan dalam penentuan bobot setiap wilayah untuk model regresi. Ketika pengamatan masih dalam radius artinya model pada lokasi tersebut masih dianggap memiliki pengaruh, maka model dapat diberi bobot. Untuk menghindari heterogen dari varian, haruslah nilai *bandwidth optimum*. Menurut (Fotheringham dkk. 2002) terdapat beberapa metode penentuan *bandwidth optimum* salah satunya yaitu metode *Cross Validation* (CV).



Berikut persamaan CV secara matematis :

$$CV = \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}_i(\mathbf{b})]^2$$

dimana  $\hat{y}_i$  merupakan penduga  $y_i$  dimana lokasi pengamatan  $(u_i, v_i)$  dihilangkan dari proses estimasi guna mendapat radius yang optimal, sehingga mendapat CV minimum.

### Pembobot GWR

Analisis model yang memperhatikan aspek spasial memerlukan pembobotan dalam perhitungannya. Hubungan kedekatan (neighboring) antarlokasi pengamatan dinyatakan dalam bentuk matriks pembobot  $W_{ij}$  (Bekti 2012). Elemen pada matriks berisi  $W_{ij}$  yang menyatakan kedekatan lokasi  $i$  dengan lokasi  $j$ . Jika bobotnya semakin besar maka lebih berpengaruh. Sedangkan pembobot dengan fungsi kernel mampu memberikan bandwidth optimum dimana nilainya sesuai dengan keadaan data. matriks pembobot berdasarkan fungsi kernel *Gaussian* yang diperoleh sebagai berikut:

$$w_1(u_1, v_1) = \exp\left(-\frac{1}{2} \left( \frac{d_{11}}{2,452475} \right)^2\right)$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2} \left( \frac{0}{2,452475} \right)^2\right) = 1$$

Setelah didapat hasil pembobot, maka dapat dilihat nilai pembobot setiap lokasi dalam bentuk matriks sebagai berikut :



$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & \dots & w_{1,34} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & \dots & w_{2,34} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} & \dots & w_{3,34} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{34,1} & w_{34,2} & w_{34,3} & \dots & w_{34,34} \end{bmatrix}$$

Dengan mensubstitusikan hasil nilai pembobot ( $w$ ) pada lampiran 5 diperoleh matriks  $\mathbf{W}$  secara keseluruhan sebagai berikut:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0,68154395 & 0,02193570 & \dots & 2,66175180 \\ 0,68154395 & 1 & 0,21615939 & \dots & 4,49076794 \\ 0,02193570 & 0,12615939 & 1 & \dots & 2,36093345 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2,66175180 & 4,49076794 & 2,36093345 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Setelah didapatkan pembobot maka akan dilanjutkan menguji parameter untuk setiap wilayah.

### Pengujian Kesesuaian dan Parameter Model GWR

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah GWR sudah tepat digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  :  $(u_i, v_i) = \beta_p$ ,  $p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 34$  (tidak ada pengaruh faktor geografis pada PDRB di Indonesia)

$H_1$  : ada  $\beta_p(u_i, v_i) \neq \beta_p$ :  $p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 34$  (ada pengaruh faktor geografis pada PDRB di Indonesia)

Kriteria uji

Tolak  $H_0$  jika  $F_{hit} > F_{\alpha,1,df2}$



Uji parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial yang digunakan untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR setiap provinsi di Indonesia dengan hipotesisnya adalah:

$H_0: (u_i, v_i) = 0$  (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap PDRB)

$H_1: (u_i, v_i) \neq 0$  dengan  $j = 0, 1, 2, 3$  dan  $i = 1, 2, \dots, 34$  (ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap PDRB). Satu parameter dikatakan signifikan jika nilai  $|T_{hit}| > t_{\alpha/2, db}$  dengan  $\alpha = 5\%$

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pemodelan kemiskinan dengan Metode GWR ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan variabel prediktor dan variabel respon
2. Melakukan pemodelan *Geographically Weighted Regression* (GWR),
  - a) Melakukan perbandingan antara model Global Regression dengan model GWR
  - b) Menentukan bandwidth optimum menggunakan metode cross validation
  - c) Menghitung matriks pembobot dengan menggunakan fungsi kernel Fixed Gaussian
  - d) Melakukan pengujian kesesuaian model GWR menggunakan uji F
  - e) Melakukan pengujian parameter model GWR menggunakan uji T
3. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah presentase penduduk miskin.
4. Menginterpretasikan model yang diperoleh.



# 4

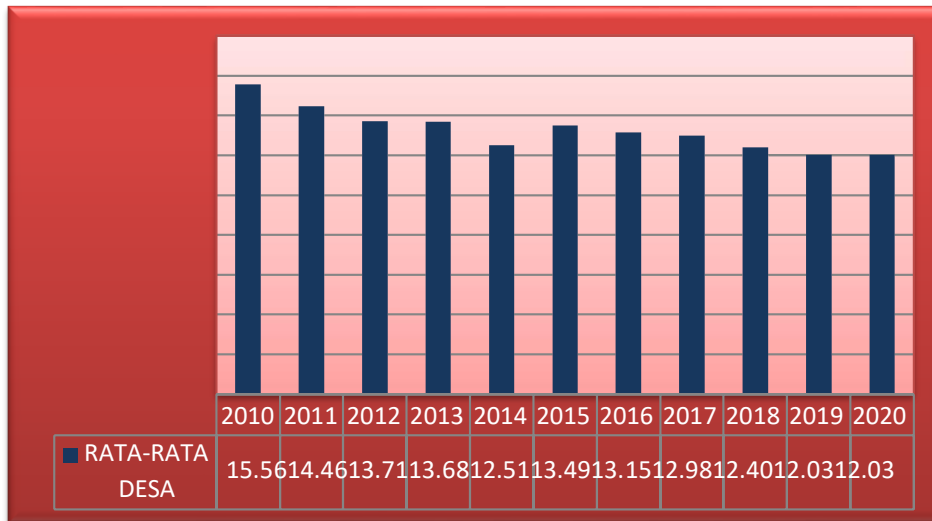
## PENDUDUK MISKIN DAN INDIKATOR KEMISKINAN DI INDONESIA

### 4.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

#### Tahun 2010-2020

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan diantaranya adalah melihat besaran persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin memberikan indikasi besarnya kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah. Penduduk miskin sebagai anggota rumah tangga miskin, rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan (BPS, 2020).

Kemiskinan dianggap sebagai tidak mempunya seseorang ataupunsekelompok dalam mencukupi kebutuhan standar hidupnya dan ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan guna mencukupi kebutuhan dasarnya (Murtala, 2020). Berikut pada Gambar 7.1 dan 7.2 kondisi perkembangan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan Indonesia.



**Gambar 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

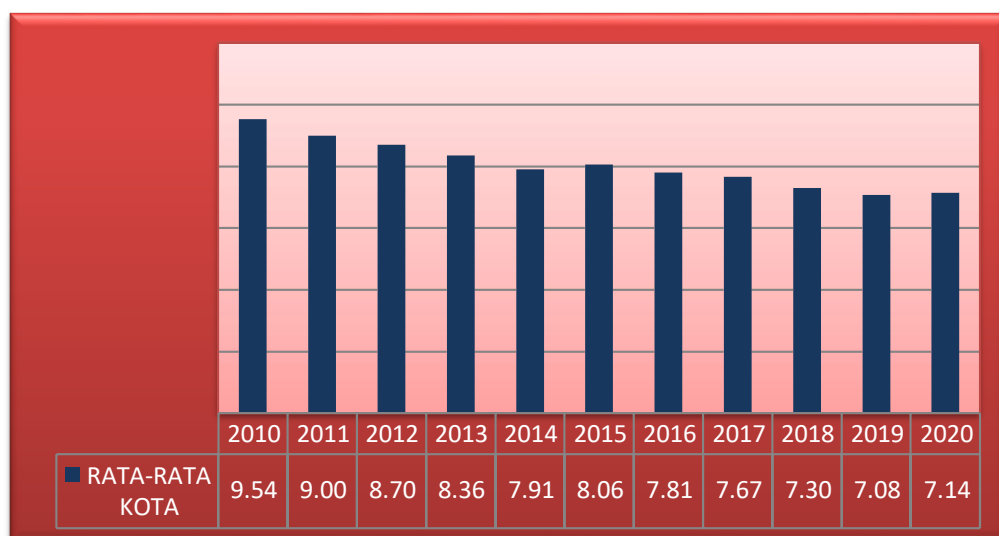
Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Indonesia pada tahun 2010-2020 yang memiliki angka bervariasi. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar rata-rata Provinsi di wilayah perdesaan memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dengan nilai rasio lebih dari 10 persen (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Gambar menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di setiap Provinsi wilayah perdesaan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari tahun 2010-2020 masih belum stabil. Jika diperhatikan dari Gambar di atas bahwa di tahun 2015-2020 persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 rata-rata penduduk miskin di perdesaan sebesar 13.49 persen turun menjadi 13.15 persen di tahun 2016 dan kembali turun di tahun 2017 sebesar 12.98 persen dan 12.40 persen di tahun 2018 menjadi 12.03 persen di tahun 2019 dan 2020.



Persentase penduduk miskin yang menurun di topang oleh berbagai kebijakan bantuan sosial seperti adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta bantuan tunai lainnya. Persentase penduduk miskin yang tinggi harus ditekan agar masyarakat terbebas dari jerat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif apabila indikasi persentase penduduk miskin menunjukkan angka penurunan setiap tahunnya, pendapatan naik serta tingkat daya beli masyarakat yang tinggi. Berhasilnya dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari satu sektor saja akan tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor yang menunjang dalam pembangunan ekonomi (Harya, 2019).



**Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan Indonesia**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*





Berdasarkan Gambar 4.2, ditengah upaya Pemerintah kota menekan angka kemiskinan, ternyata efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini. Terimbas efek pandemi Covid mulai tahun 2020, tren negatif penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia terhenti, dan diprediksi akan terus meningkat. Menurut Lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) memproyeksikan dengan skenario pesimistis bahwa tingkat kemiskinan pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk miskin. Hal tersebut dipicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi.

Tentunya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu negara salah satunya adalah masalah pengangguran. Sama seperti kemiskinan, masalah pengangguran juga merupakan masalah universal yang bahkan terjadi dinegara maju dan makmur sekalipun. Menurut Todaro (2000), sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman. Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur karna jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.



## **4.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Indonesia**

### **Tahun 2010-2020**

Poses pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih mengalami kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah yang ada di daerah pedesaan atau perbatasan memiliki kualitas yang lebih rendah serta jumlah pendaftar yang lebih sedikit dibandingkan sekolah yang ada di tengah kota.

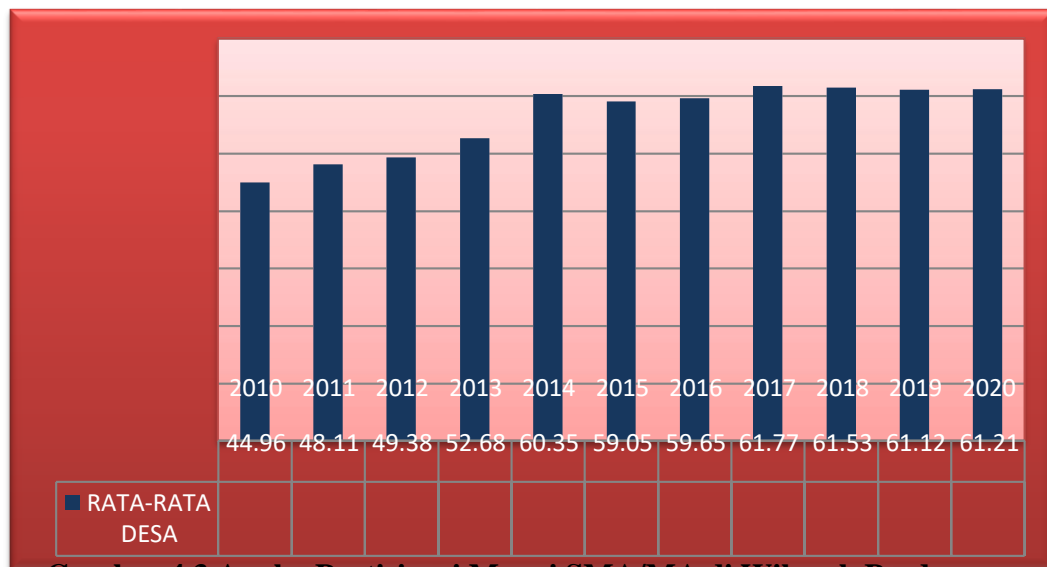
UU 45 mengamanatkan kepada negara agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, setidaknya setiap penduduk Indonesia mendapat pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun, mulai tingkat dasar atau Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat menengah atas atau Sekolah Menengah Atas (SMA), dan saat ini dengan perkembangan kebutuhan manusia akan pendidikan, pendidikan dimulai semenjak usia dini atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Amanat UU 45 ini berdasarkan pada kemajuan bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan, dan pendidikan merupakan modal utama untuk kemajuan suatu bangsa, sehingga pemerataan pendidikan menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan nasional (Ru'ung, 2021).

Namun sayangnya kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti sarana prasarana, sumber daya tenaga pendidik sampai dengan kesempatan memperoleh pendidikan, utamanya disebabkan demografi. Kesempatan memperoleh pendidikan antara mereka yang tinggal di kota dengan yang di Desa terutama yang berada daerah terpencil akan sangat terlihat, anak-anak di kota-kota besar jauh lebih mudah mendapat akses pendidikan dengan



fasilitas yang baik, serta berkesempatan meningkatkan kualitas hidupnya dibanding anak-anak di wilayah pedesaan (Ru'ung, 2021). Berikut dijelaskan perkembangan angka partisipasi murni SMA/MA di wilayah Perdesaan dan Perkotaan Indonesia.



**Gambar 4.3 Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Wilayah Perdesaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan angka partisipasi murni SMA/MA di wilayah pedesaan beragam. Pada tahun 2017 merupakan tahun dengan tingkat angka partisipasi murni SMA/MA tertinggi di wilayah pedesaan Indonesia yaitu sebesar 61.77 persen. Sedangkan angka partisipasi murni SMA/MA di wilayah pedesaan Indonesia terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 44.96 persen.

Kebijakan pemerataan kualitas pendidikan difokuskan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan



masyarakat yang heterogen baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah (Maulida, 2021).

Pada tahun ajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) atau yang disebut dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Tepatnya pada tanggal 25 Juni 2013, program tersebut telah diresmikan oleh Mendikbud Subijanto (2014), program wajib belajar 12 tahun dimaksudkan agar semua peserta didik mendapatkan akses layanan pendidikan sampai lulus pendidikan tingkat menengah, yang mencakup pendidikan umum dan kejuruan. Hal ini didukung oleh keberhasilan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2011. Sekalipun demikian, program wajib belajar 9 tahun perlu dilanjutkan agar seluruh anak usia pendidikan dasar di Indonesia dapat menyelesaikan pendidikannya sampai SMP atau yang sederajat (Maulida, 2021).

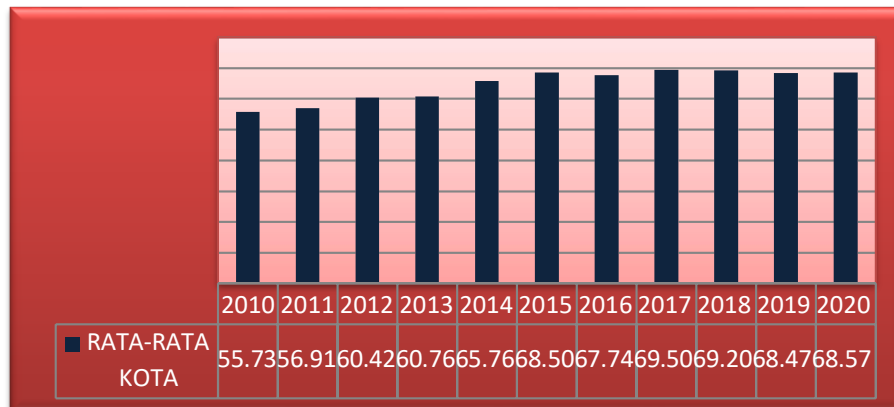
Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka diharapkan pada tahun 2021 akan tercapai angka partisipasi Murni SMA/MA 97% pada jumlah penduduk di wilayah perdesaan yang berusia 15-18 tahun, minimal lulus hingga jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/MAK, atau sederajat. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan wajib belajar 12 Tahun (Sampai Tingkat SMA) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah (Maulida, 2021).



Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan wajib belajar terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal cukup banyak yaitu angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan prasarana belum memadai serta infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih sangat kurang, anggaran dana dan lain sebagainya.

A.A. Tilaar mengatakan perlu mendapat perhatian khusus mengenai keterjangkauan (*accessability*) pendidikan meskipun wajib belajar tersebut merupakan tanpa biaya alias gratis, tetapi kebanyakan orang tua terutama di negara-negara yang berkembang menghalang-halangi masuknya anak-anak di sekolah karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki, jumlah tanggungan keluarga, jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh serta akses yang sulit, latar belakang pendidikan orang tua, dan tingkat pendapatan.

Hakim L (2016), mengatakan bahwa penyebab dari dampak putus sekolah yaitu mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran, merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih, anak putus sekolah sering mengganggu keamanan serta anak yang putus sekolah cenderung menjadi subjek dan objek kriminalitas seperti tawuran dan perkelahian.



**Gambar 4.4 Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Wilayah Perkotaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa perkembangan angka partisipasi murni SMA/MA di wilayah perkotaan berbeda-beda. Pada tahun 2017 merupakan tahun dengan tingkat angka partisipasi murni SMA/MA tertinggi di wilayah perkotaan Indonesia yaitu sebesar 69.50 persen. Sedangkan angka partisipasi murni SMA/MA di wilayah perkotaan Indonesia terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 55.73 persen.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Ketersediaan anggaran biaya sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan.



Ketentuan anggaran pendidikan tertuang pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Syafii (2018) menyatakan bahwa realitanya daerah-daerah belum mampu merealisasikan penganggaran tersebut. Hanya ada satu daerah yang telah mampu melakukan penganggaran sebanyak minimal 20% tersebut yaitu Jakarta. Harus diakui bahwa upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP. Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat strategi untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang bermutu bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Menurut Cheng & Cheung (2015) manajemen berbasis sekolah juga diperlukan bertujuan untuk meningkatkan praktik sekolah dalam implementasi program wajib belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut tidak cukup jika hanya melibatkan desentralisasi kekuasaan yang sederhana dari otoritas pusat ke tingkat lokasi.



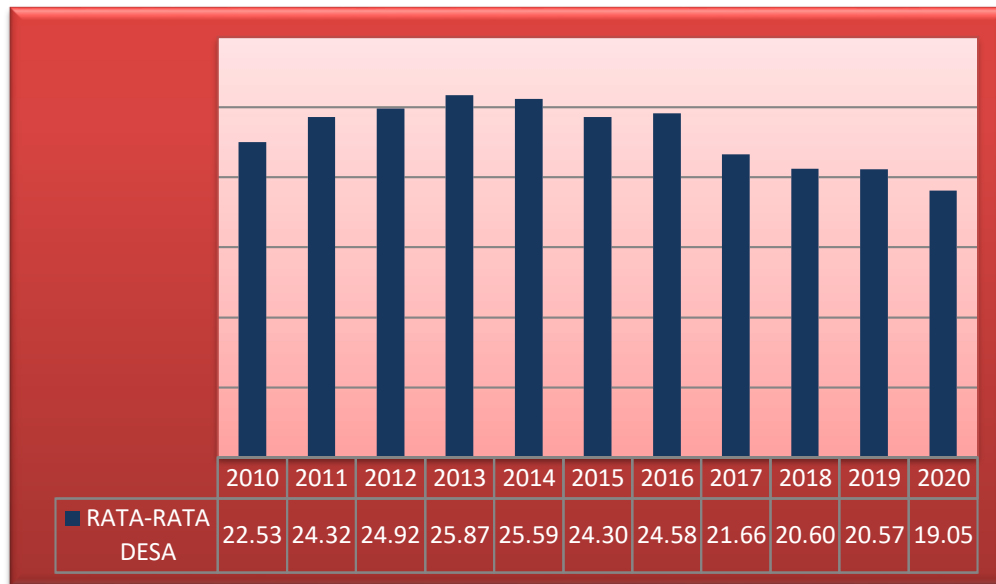
### **4.3 Perkembangan Belanja Modal di Indonesia Tahun 2010-2020**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan belanja yang dilakukan dalam mendukung pemenuhan prasarana bagi kebutuhan publik berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya atas kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah.

Sebagaimana yang dimaksud di atas belanja modal merupakan biaya pengeluaran untuk membangun infrastruktur publik yang berguna dalam kepentingan publik dan pemerintahan. Namun, dalam perkembangannya belanja modal di wilayah perdesaan terus mengalami penurunan dibandingkan dengan belanja modal di wilayah perkotaan.

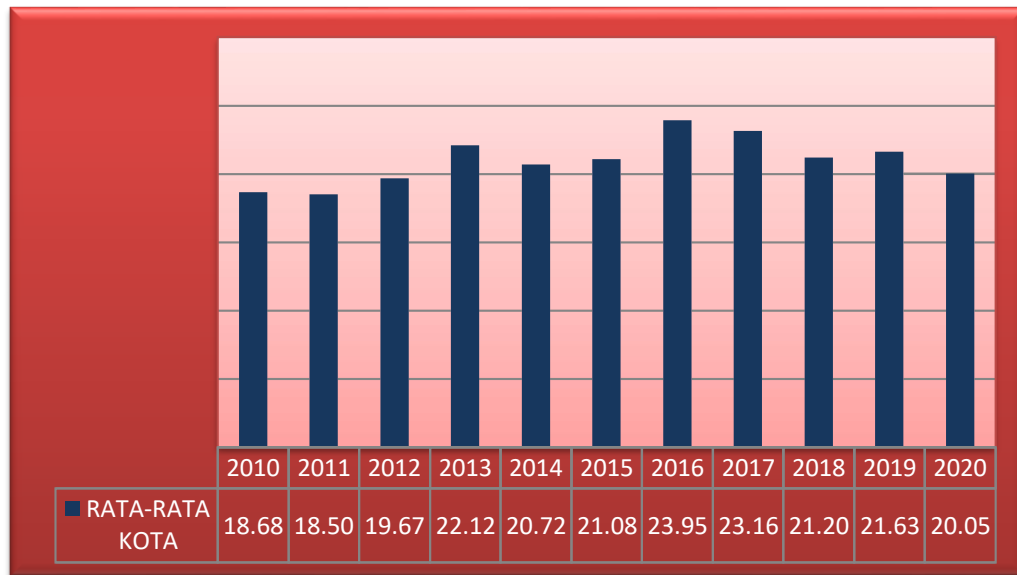
Dengan belanja modal yang menurun menunjukkan bahwa belanja yang ada tidak memadai dan tidak menunjukkan penambahan yang signifikan jika dilihat dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menjadikan investor swasta nasional maupun investor asing memilih untuk tidak berinvestasi di daerah serta berpotensi menimbulkan kerugian publik. Berikut dijelaskan data mengenai realisasi belanja modal tahun 2010-2020 pada pemerintah provinsi di wilayah perdesaan dan perkotaan Indonesia.





**Gambar 4.5 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Perdesaan Indonesia**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.5 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di wilayah perdesaan Indonesia tahun 2010-2020. Realisasi belanja modal pada tahun 2010-2020 pada 34 provinsi di wilayah perdesaan memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 rata-rata realisasi belanja modal sebesar 20.57 persen, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata realisasi belanja modal hanya sebesar 19.05 persen. Hal ini membuat rata-rata realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.52 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari pemerintah yang mengubah skema proyek dari single year menjadi multiyears yang disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal.



**Gambar 4.6 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Perkotaan Indonesia**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.6 menjelaskan perkembangan realisasi belanja modal pada pemerintah provinsi di wilayah perkotaan Indonesia tahun 2010-2020. Realisasi belanja modal pada tahun 2010-2020 pada 34 provinsi di wilayah perkotaan memiliki kecenderungan menurun. Dimana pada tahun 2019 rata-rata realisasi belanja modal sebesar 21.63 persen, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata realisasi belanja modal hanya sebesar 20.05 persen. Hal ini membuat rata-rata realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.58 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja modal ini merupakan salah satu faktor dari pemerintah yang mengubah skema proyek dari single year menjadi multiyears yang disebabkan terjadinya pemangkasan belanja modal. Dengan demikian perubahan skema proyek tersebut membuat belanja modal baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan menjadi menurun yang disebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia, sehingga pemerintah pengelolaan anggaran mengeluarkan Peraturan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ



dan No. 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April mengenai *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Terjadinya *refocusing* yang mengharuskan pemerintah merubah alokasi anggaran yang ada baik di pusat maupun di daerah. Dengan perubahan tersebut membuat adanya pemangkasan sekurang- kurangnya 50 persen dari anggaran seharusnya (Rahayu, 2021).

#### **4.4 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial di Indonesia Tahun 2010-2020**

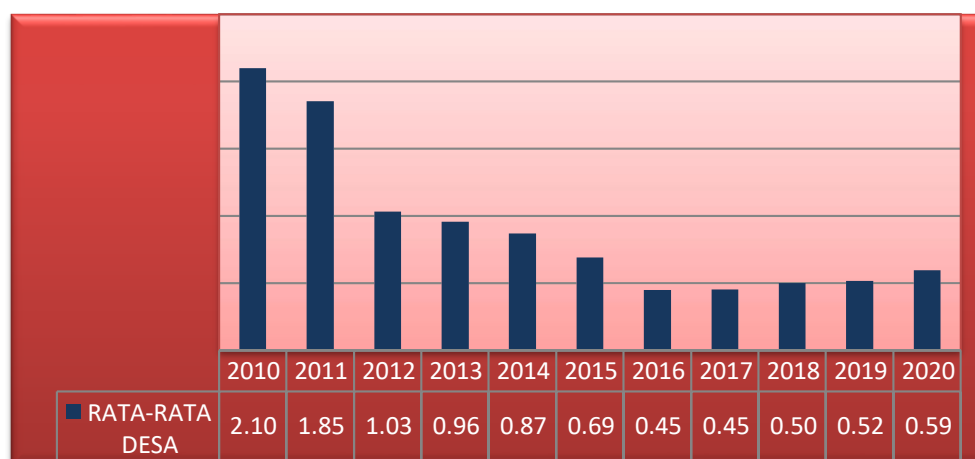
Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Adapun Bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran tetapi diberikan secara selektif dan mempunyai kejelasan peruntukkan bagi penggunaannya. Dalam penganggarannya, bantuan sosial dianggarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang telah tercantum dalam keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.



Pengalokasian belanja bantuan sosial kedalam anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang tidak hanya mencakup aspek pendapatan dan konsumsi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan . Oleh karena itu, pengalokasian belanja bantuan sosial pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia ekspektasinya adalah untuk penurunan angka kemiskinan (Agung, 2014). Berikut ini dapat dilihat perkembangan belanja bantuan sosial di wilayah perdesaan dan perkotaan Indonesia tahun 2010-2020 pada Gambar 4.7 dan 4.8 di bawah ini.

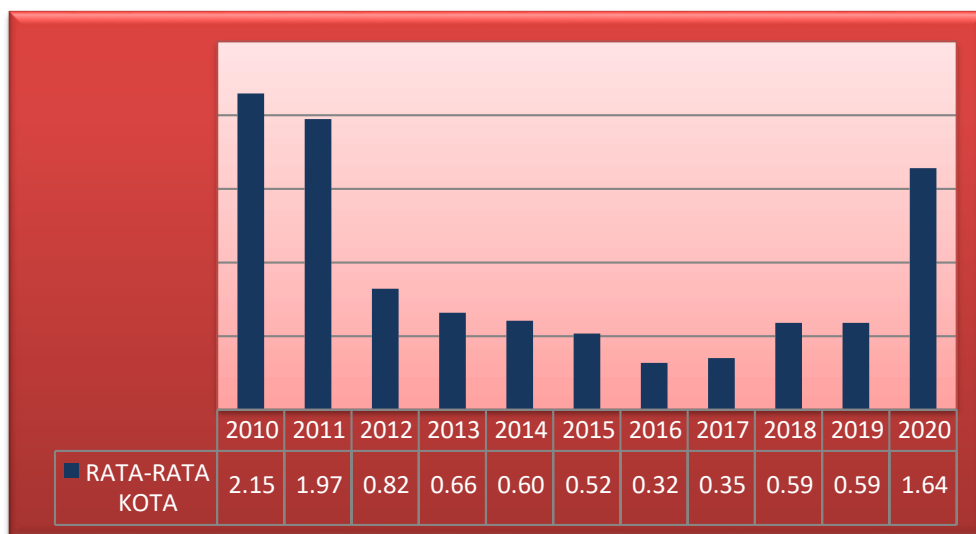


**Gambar 4.7 Belanja Bantuan Sosial di Wilayah Perdesaan Indonesia**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa belanja bantuan sosial di wilayah perdesaan seluruh Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2020 terus mengalami fluktuatif. Perkembangan belanja bantuan sosial tertinggi yakni tahun 2010 sebesar 2.10 persen. Tingginya perkembangan belanja bantuan sosial pada tahun 2010 karena ditinjau dari sudut realisasi anggaran jika anggaran belanja bantuan sosial berubah maka untuk kondisi sosial masyarakat baik dari segi



pendapatan, konsumsi dan sosial juga akan mengalami perubahan. Sementara itu rata-rata belanja bantuan sosial terendah yakni terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 0.45 persen, hal ini karena pada tahun tersebut realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.



**Gambar 4.8 Belanja Bantuan Sosial di Wilayah Perkotaan Indonesia**  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

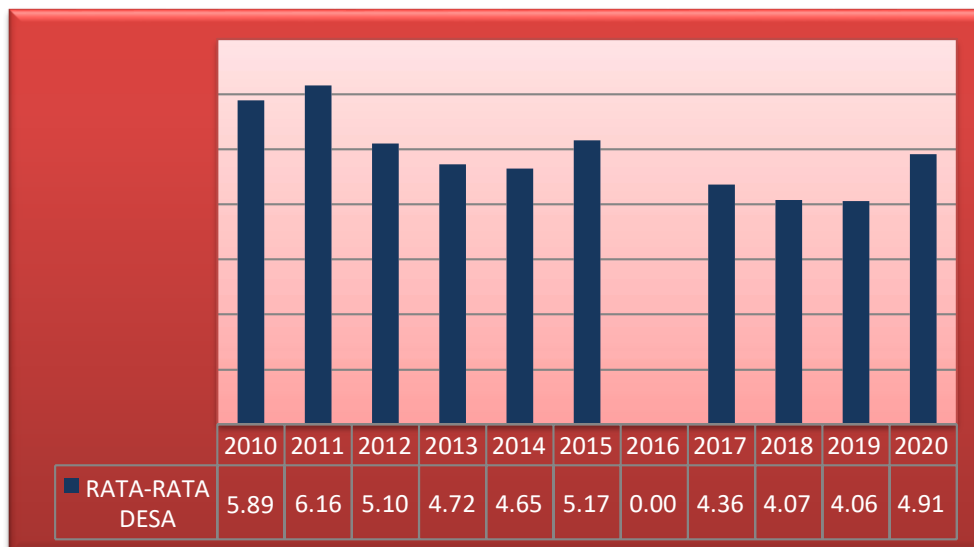
Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa belanja bantuan sosial di wilayah perkotaan seluruh Provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2020 terus mengalami fluktuatif. Perkembangan belanja bantuan sosial tertinggi yakni tahun 2010 sebesar 2.15 persen. Tingginya perkembangan belanja bantuan sosial pada tahun 2010 karena ditinjau dari sudut realisasi anggaran jika anggaran belanja bantuan sosial berubah maka untuk kondisi sosial masyarakat baik dari segi pendapatan, konsumsi dan sosial juga akan mengalami perubahan. Sementara itu rata-rata belanja bantuan sosial terendah yakni terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.32 persen, hal ini karena pada tahun tersebut realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya.



Pemerintah seharusnya dengan anggaran yang ada dapat melakukan belanja bantuan sosial harus tepat dan akutanbel. Selain itu juga dalam penyaluran bantuan sosial seharusnya pemerintah melakukan secara selektif kepada para penerima bantuan yang memenuhi kriteria risiko sosial. Belanja bantuan sosial ini dilakukan untuk menanganani resiko sosial ditujukan kepada orang miskin atau tidak mampu, selain penyerahan secara langsung, pemerintah dapat melakukannya dengan diserahkan melalui kelompok atau lembaga pemerintah maupun bukan lembaga pemerintah. Sehingga pada penyaluran belanja bantuan sosial tidak terjadi kendala.

#### **4.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2020**

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya adalah masalah ketenagakerjaan. Apalagi setelah mengalami krisis multifaset yang menjerumuskan negara Indonesia ke dalam kemerosotan ekonomi, politik, moral dan sosial. Masalah dengan perkembangan pasar tenaga kerja adalah tingginya pengangguran dan setengah pengangguran karena banyak bidang usaha ditutup karena kebangkrutan. Selain itu, kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, seperti kurangnya perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pengangguran berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja. Jika kedua hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul berbagai dampak negatif baik terhadap stabilitas ekonomi maupun sosial dan politik (Rizky, 2022).



**Gambar 4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perdesaan Indonesia**

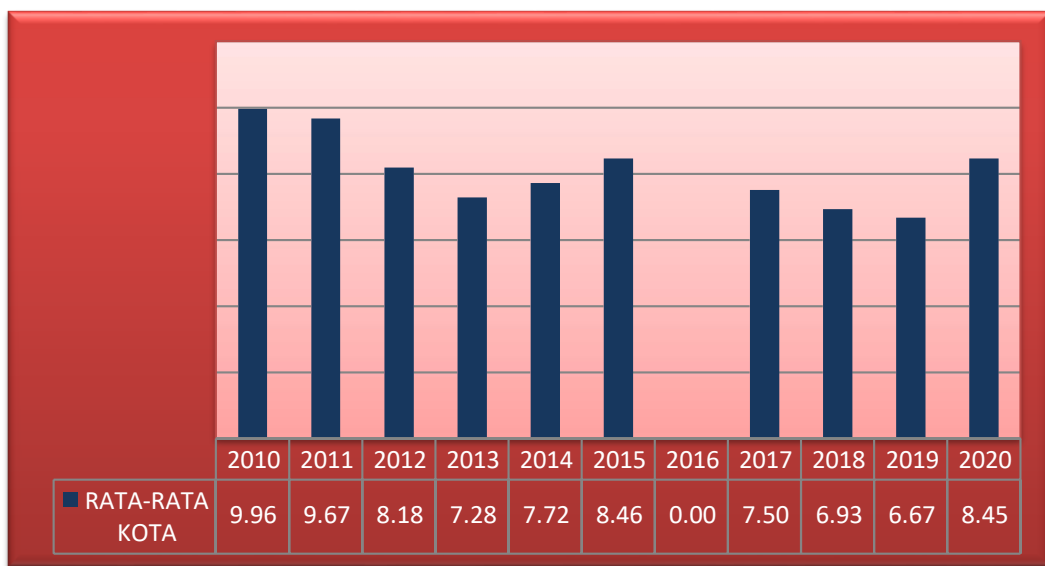
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.9 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perdesaan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011-2014 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 1.51 persen menjadi 4.65 persen di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 0.52 persen, menjadi 5.17 persen di tahun 2015. Untuk tahun 2016 data tingkat pengangguran tidak tersedia oleh sakernas dikarenakan sampel data tidak ada. Setelah itu pada tahun 2019 terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.85 persen menjadi 4.91 persen jumlah tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020.

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.16 persen. Kondisi seperti ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi penduduk di wilayah perdesaan Indonesia dan kurang terserapnya tenaga kerja



penduduk di beberapa perusahaan wilayah perdesaan di Indonesia. Kondisi seperti ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan ketenagakerjaan di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memperbanyak lapangan pekerjaan agar dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal di wilayah perdesaan Indonesia (Firman, 2022).



**Gambar 4.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Perkotaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas, tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 2.68 persen menjadi 7.28 persen pada tahun 2013 dari 9.96 persen di tahun 2010. Namun pada tahun 2014-2015 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0.74 persen menjadi 8.46 persen pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 data tingkat pengangguran tidak tersedia oleh sakernas dikarenakan sampel data tidak ada.



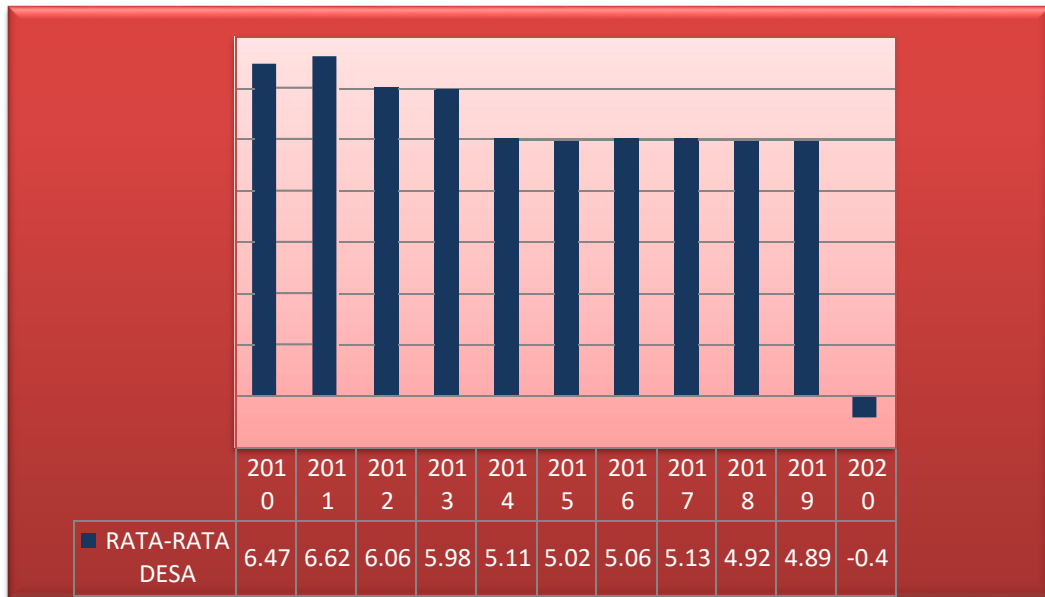


Pada tahun 2017-2019 tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali sebesar 0.83 persen menjadi 6.67 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan kembali sebesar 1.78 persen menjadi 8.45 persen di tahun 2020.

Pengangguran menjadi masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Nurjanah, 2022).

#### **4.6 Perkembangan Pertumbuhan Produk Regional Bruto Menurut Atas Harga Dasar Konstan di Indonesia Tahun 2010-2020**

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk lepas dari jerat kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan (Rosita, 2022)



**Gambar 4.11 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perdesaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

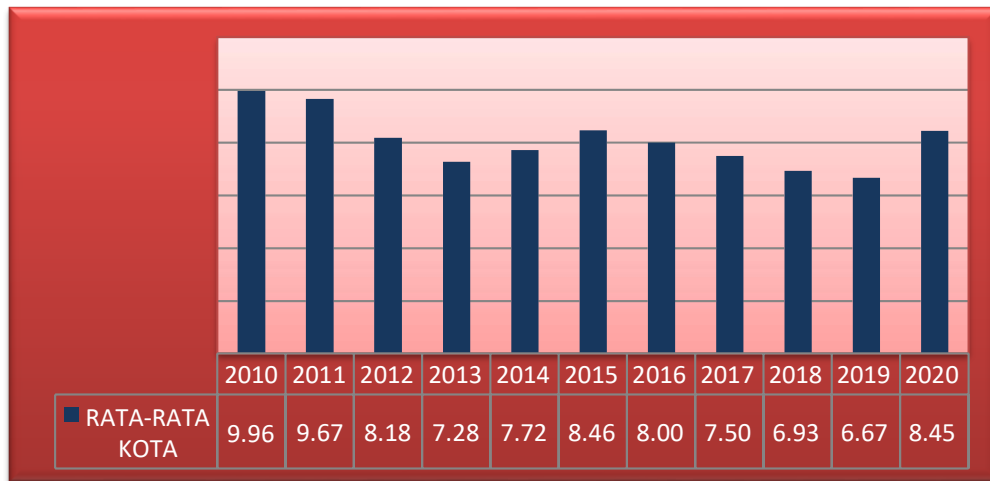
Berdasarkan Gambar 4.11 bahwa Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perdesaan 10 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perdesaan mengalami peningkatan, ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tahun 2011 sebesar 6.62 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar 6.47 persen, Begitu pula dengan pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami penurunan selama berturut-turut hingga mencapai angka negatif pada tahun 2020 sebesar 0.42 persen.



Dari data diatas bahwa segala kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan berjalan belum sesuai ekspektasi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Himawan, 2016).

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, namun masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat serta munculnya berbagai permasalahan sosial yang mendasar. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah yang berarti kebutuhan ekonomi pun akan bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Penambahan pendapatan tersebut diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidakakan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Pakri, 2022).



**Gambar 4. 12 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di Wilayah Perkotaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (data diolah)*

Berdasarkan Gambar di atas bahwa Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perkotaan Indonesia mengalami fluktuatif yang beragam. Pencapaian terbaik dalam menekan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 9.96 persen. Sementara angka Pertumbuhan PDDR B Menurut ADHK terendah di wilayah perkotaan Indonesia terjadi pada tahun 2019 yaitu 6.67 persen. Secara umum Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perkotaan Indonesia memiliki tren yang fluktuatif selama periode 2010 hingga tahun 2020.

# 5

## KONDISI KEMISKINAN DESA DAN KOTA DI INDONESIA (METODE GWR)

### 5.1 Hasil Perbandingan Model di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

**Tabel 5. 1 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression  
dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010**

Model	Residual sum of squares	R squares
Global Regression	1.573.069.528	0.167127
GWR	743.400.116	0.597183

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap seluruh variabel beserta intersepnnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 1.573.069.528 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.167127. Artinya, sebanyak 16.713 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 83.287 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 743.400.116 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.597183. Artinya 59.718 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 40.282 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.



Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.597183 > 0.167127$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR. Setelah dilakukan perbandingan pada tahun 2010, selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global Regression dan GWR di wilayah Desa seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2015 seperti dijelaskan pada Tabel 5.2 di bawah ini.

**Tabel 5. 2 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015**

<b>Model</b>	<b>Residual sum of squares</b>	<b>R squares</b>
Global Regression	1.013.648.870	0.30662
GWR	539.978.544	0.630631

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 1.013.648.870 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.30662. Artinya, sebanyak 30.662 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 69.338 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 539.978.544 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.630631. Artinya 63.063 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 36.937 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.



Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.630631 > 0.30662$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR dan jika dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya, perbandingan yang dilakukan pada tahun 2015 jauh lebih baik. Hal ini bisa kita perhatikan dari nilai  $R^2$  yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 0.597183 menjadi 0.630631. Kemudian setelah didapat hasil  $R^2$  di tahun 2015 maka selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global Regression dan GWR di wilayah Desa seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020 seperti dijelaskan pada Tabel 5.3 di bawah ini.

**Tabel 5. 3 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020**

<b>Model</b>	<b>Residual sum of squares</b>	<b>R squares</b>
Global Regression	697.990.095	0.38803
GWR	665.821.796	0.416234

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perdesaan terhadap seluruh variabel beserta intersepnnya, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 697.990.095 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.38803. Artinya, sebanyak 38.803 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 61.197 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.



Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 665.821.796 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.416234. Artinya 41.623 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 58.377 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.416234 > 0.38803$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR. Hasil perbandingan yang dilakukan pada tahun 2020 jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, dimana pada tahun 2015 nilai  $R^2$  sudah berhasil mencapai angka 0.50, artinya semakin tinggi nilai  $R^2$  maka pengaruh model akan semakin baik karena bisa mendekati 100 persen. Namun, setelah dilakukan perbandingan kembali pada tahun 2020 ternyata nilai  $R^2$  yang di hasilkan lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2015.

**Tabel 5. 4 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

Model	Residual sum of squares	R squares
Global Regression	424.799.850	0.298534
GWR	330.758.666	0.453823

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotan terhadap seluruh variabel beserta intersepnnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 424.799.850 dan nilai





Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.298534. Artinya, sebanyak 29.853 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 70.147 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 330.758.666 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.453823. Artinya 45.382 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 54.617 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.453823 > 0.298534$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR. Setelah dilakukan perbandingan pada tahun 2010, selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global Regression dan GWR di wilayah Kota seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2015 seperti dijelaskan pada Tabel 5.5 di bawah ini.

**Tabel 5. 5 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

<b>Model</b>	<b>Residual sum of squares</b>	<b>R squares</b>
Global Regression	400.706.581	0.309841
GWR	368.462.413	0.365376

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotaan terhadap seluruh variabel beserta intersepnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di



perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 400.706.581 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.309841. Artinya, sebanyak 30.984 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 69.016 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 368.462.413 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.365376. Artinya 36.537 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 63.463 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.365376 > 0.309841$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR dan jika dilihat dari perbandingan tahun sebelumnya, perbandingan yang dilakukan pada tahun 2015 jauh lebih menurun.

Hal ini bisa kita perhatikan dari nilai  $R^2$  yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 0.453823 menjadi 0.365376. Kemudian setelah didapat hasil  $R^2$  di tahun 2015 maka selanjutnya dilakukan kembali perbandingan model menggunakan metode Global Regression dan GWR di wilayah Kota seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020 seperti dijelaskan pada Tabel 5.6 di bawahini.



**Tabel 5. 6 Perbandingan Model Menggunakan Metode Global Regression dan GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020**

<b>Model</b>	<b>Residual sum of squares</b>	<b>R squares</b>
Global Regression	311.921.177	0.237737
GWR	265.179.369	0.351963

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat dilihat bahwa pada model Global regression dengan pembobot Fixed Kernel yang dilakukan di wilayah perkotaan terhadap seluruh variabel beserta intersepnya tidak jauh berbeda dengan wilayah di perdesaan, dihasilkan nilai Residual sum of squares sebesar 311.921.177 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.237737. Artinya, sebanyak 23.773 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model, dan sisanya sebanyak 76.227 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model. Sedangkan pada model GWR menggunakan pembobot Fixed Kernel terhadap seluruh variabel beserta intersepnya, dihasilkan nilai residual sum of squares sebesar 265.179.369 dan nilai Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0.351963. Artinya 35.196 model dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya sebanyak 64.804 dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar model.

Berdasarkan perbandingan kedua model, didapatkan nilai koefisien determinasi model GWR lebih besar dibandingkan dengan model Global Regression yaitu ( $0.351963 > 0.237737$ ) sehingga penggunaan model yang lebih baik adalah model GWR. Hasil perbandingan yang dilakukan pada tahun 2020 semakin menurun dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, dimana pada tahun



2015 nilai  $R^2$  sebesar 0.36 persen. Namun, setelah dilakukan perbandingan kembali pada tahun 2020 ternyata nilai  $R^2$  yang di hasilkan lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 0.35 persen pada tahun 2020.

Dari penjelasan yang terjadi di wilayah perdesaan maupun di perkotaan maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbandingan model yang telah dilakukan mendapatkan hasil Koefisien Determinasi atau biasa kita kenal dengan sebutan  $R^2$  bahwa di wilayah perdesaan perbandingan model yang dihasilkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang dilakukan di wilayah perkotaan.

## 5.2 Penentuan Bandwidth Selection di Wilayah Desa dan Kota Seluruh

### Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Penentuan bandwidth yang akan digunakan pada model GWR dengan melihat nilai Cross Validation (CV) yang paling minimum diantara fungsi pembobot. Penentuan bandwidth minimum dilakukan dengan bantuan software GWR (*Geographically Weighted Regression*). Fungsi pembobot yang digunakan yaitu Fixed Kernel, untuk penentuan bandwidth tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.7 sebagai berikut:

**Tabel 5. 7 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2010**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	54.680	11.217

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*



Berdasarkan Tabel 5.7. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 11.217 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 54.680. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 18 kali perulangan. Setelah di dapat nilai iterasi tahun 2010 selanjutnya dilakukan penentuan Bandwidth kembali pada tahun 2015 pada Tabel 5.8 di bawah ini.

**Tabel 5. 8 Cross Validation (CV) dan Provinsi Indonesia Tahun 2015**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	39.968	10.289

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.8. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 10.289 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 39.968. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 18 kali perulangan. Kemudian dilakukan penentuan bandwidth kembali pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel 5.9 di bawah ini.

**Tabel 5. 9 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	58.157	30.000

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*



Berdasarkan Tabel 5.9. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perdesaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 58.157. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 26 kali perulangan.

**Tabel 5. 10 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	24.098	30.000

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.10. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 24.098. Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 31 kali perulangan.

**Tabel 5. 11 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	18.788	30.000

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*



Berdasarkan Tabel 5.11. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 18.788 Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 22 kali perulangan.

**Tabel 5. 12 Cross Validation (CV) dan bandwidth pada Fungsi Pembobot di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020**

<b>Fungsi Pembobot</b>	<b>CV Minimum</b>	<b>Bandwidth</b>
Kernel Fixed Gaussian	22.132	30.000

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.12. Penentuan bandwidth selection yang dilakukan di wilayah perkotaan menggunakan metode Golden Section Search pada model GWR, didapatkan ukuran bandwidth optimal sebesar 30.000 dengan nilai minimum kernel CV yaitu 22.132 Adapun nilai iterasi yang dilakukan hingga diperoleh model terbaik dilakukan sebanyak 29 kali perulangan.

### **5.3 Estimasi Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020**

Tahap selanjutnya penaksiran parameter untuk mengamati hubungan antar variabel respon dan variabel predictor berdasarkan nilai koefisien dengan *metode weighted least square* (WLS) yang digunakan menaksir parameter.



**Tabel 5. 51 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010**

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Median</b>	<b>Maximum</b>
Intercept	8.667.246	12.090.591	14.774.689
BS	-0.763391	0.47544	5.211.828
BM	-0.129859	-0.020804	0.234186
APM SMA	-0.007925	0.10382	0.218916
TPT	-0.53203	-0.296539	0.042978
GPDRBADHK	-0.741507	-0.46369	-0.089797

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.13. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar 8.667.246 dan nilai maximum sebesar 14.774.689. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{33}, v_{33}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.





**Tabel 5. 52 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015**

Variabel	Minimum	Median	Maximum
Intercept	-8.167.946	17.069.283	56.140.367
BS	-1.865.056	1.843.808	5.359.861
BM	-0.753049	-0.174616	-0.093373
APM SMA	-0.613	-0.01633	0.376344
TPT	-0.417425	-0.052311	2.307.979
GPDRBADHK	-0.142055	0.022799	0.255142

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.14. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar -8.167.946 dan nilai maximum sebesar 56.140.367. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{33}$ ,  $v_{33}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.



**Tabel 5. 53 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020**

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Median</b>	<b>Maximum</b>
Intercept	114.658.075	121.550.940	126.873.430
BS	0.54668	0.69146	0.956168
BM	-0.020139	0.012359	0.071934
APM SMA	-1.842.404	-1.761.280	-1.665.816
TPT	-0.584737	-0.498376	-0.477342
GPDRBADHK	0.432843	0.516838	0.557954

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.15. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar 114.658.075 dan nilai maximum sebesar 126.873.430. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel.

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{33}$ ,  $v_{33}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.



**Tabel 5. 54 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Median</b>	<b>Maximum</b>
Intercept	-14.027.901	-11.182.469	-9.500.589
BS	-3.383.771	-1.026.681	-1.019.771
BM	-0.152741	-0.045689	-0.039123
APM SMA	0.32419	0.327873	0.603837
TPT	0.198507	0.727355	0.825238
GPDRBADHK	-0.374838	-0.269178	-0.07682

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.16. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar -14.027.901 dan nilai maximum sebesar -9.500.589. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{32}, v_{32}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.



**Tabel 5. 55 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Median</b>	<b>Maximum</b>
Intercept	-13.146.796	-1.008.317	1.817.328
BS	-0.598362	-0.377877	2.039.006
BM	-0.141838	-0.102818	-0.053383
APM SMA	0.068208	0.076304	0.268562
TPT	0.726048	0.739011	0.960973
GPDRBADHK	-0.411739	-0.029919	0.180381

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.17. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar -13.146.796 dan nilai maximum sebesar 1.817.328. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Penganggran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{32}, v_{32}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.



**Tabel 5. 18 Ringkasan Penduga Parameter Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020**

<b>Variabel</b>	<b>Minimum</b>	<b>Median</b>	<b>Maximum</b>
Intercept	-57.279.562	67.675.375	77.339.586
BS	-0.000294	0.041003	0.04998
BM	-0.036076	0.193016	0.231236
APM SMA	-1.144.322	-0.997294	0.841881
TPT	0.358252	0.494365	1.068.462
GPDRBADHK	0.217165	0.377185	0.378966

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.18. bahwa estimasi parameter model GWR dengan fungsi pembobot Kernel *Fixed Gaussian* memiliki nilai intersep minimum sebesar -57.279.562 dan nilai maximum sebesar 77.339.586. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel respon ( $Y$ ) berkisar antara nilai min dan max estimasi parameter Persentase Penduduk Miskin ( $Y$ ) pada model GWR. Sedangkan nilai estimasi parameter untuk variabel Bantuan Sosial (BS), Belanja Modal (BM), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (GPDRBADHK) berkisar antara nilai minimum dan maksimum sesuai dengan Tabel .

Dilihat dari nilai maksimum dan minimum, estimasi parameter pada model GWR memiliki nilai yang berbeda-beda setiap lokasi artinya faktor geografis mempengaruhi model GWR. Proses pendugaan parameter dilakukan berulang pada setiap lokasi yaitu sampai provinsi ( $u_{32}, v_{32}$ ) atau sampai provinsi Papua Barat.



## 5.4 Pengujian Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh

### Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah GWR sudah tepat digunakan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_p(u_i, v_i) = \beta_p, p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 33$  (tidak ada pengaruh faktor geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

$H_1 : \text{ada } \beta_p(u_i, v_i) \neq \beta_p: p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 33$  (ada pengaruh faktor geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

Kriteria uji

Tolak  $H_0$  jika  $F_{hit} > F_{\alpha,1,df_2}$

Hasil pengujian kesesuaian model GWR dengan uji  $F$  di wilayah perdesaan memberikan hasil menolak  $H_0$  dimana  $F_{hit} > (2,474)$  sedangkan di wilayah perkotaan  $F_{hit} > (2,490)$ .

Sedangkan hipotesis di wilayah perkotaan juga berbeda dengan perdesaan karena terdapat satu Provinsi yang tidak memiliki Kota, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga hipotesis di wilayah perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_p(u_i, v_i) = \beta_p, p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 32$  (tidak ada pengaruh faktor geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia)

$H_1 : \text{ada } \beta_p(u_i, v_i) \neq \beta_p: p = 1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 32$  (ada pengaruh faktor geografis pada persentase penduduk miskin di Indonesia) .



**Tabel 5. 19 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hitung</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	3.487	2.474
<b>Variabel</b>		
Intercept	27.619.662	2.474
BS	6.145.146	2.474
BM	6.009.989	2.474
APM SMA	17.473.853	2.474
TPT	0.334246	2.474
GPDRBADHK	5.164.290	2.474

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.19 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta GPDRBADHK yang signifikan ( $> F_{0,05;6;26} : 2.474$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PPM = & 27.619.662(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{BS} 6.145.146(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) \\
 & + x_{BM} 6.009.989(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APM SMA} 17.473.853 \\
 & (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{GPDRBADHK} 5.164.290(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + \\
 & \varepsilon_i
 \end{aligned}$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.145.146 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662. Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM



sebanyak 6.009.989 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662. selanjutnya variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 17.473.853 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662 serta variabel GPRBADHK sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 17.473.853 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 27.619.662.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS, variabel BM, variabel APM SMA dan variabel GPDRBADHK mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010.

**Tabel 5. 20 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hit</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	2.727.096	2.474
<b>Variabel</b>		
Intercept	23.452.645	2.474
BS	672.917	2.474
BM	15.144.497	2.474
APM SMA	100.265.739	2.474
TPT	8.048.300	2.474
GPDRBADHK	1.336.897	2.474

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.20 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.





Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta TPT yang signifikan ( $> F_{0,05;6;26} : 2.474$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PPM = & 23.452.645(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{BS} 672.917(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) \\ & + x_{BM} 15.144.497(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APMSMA} 100.265.739 \\ & (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{TPT} 8.048.300 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 672.917 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645. Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 15.144.497 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645. selanjutnya variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 100.265.739 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645 serta variabel TPT sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 8.048.300 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 23.452.645.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS, variabel BM, variabel APM SMA dan variabel TPT mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015.



**Tabel 5. 21 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hitung</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	1.627.215	2.474
Variabel		
Intercept	2.905.096.426	2.474
BS	6.321.561	2.474
BM	13.280.098	2.474
APM SMA	157.868.733.200	2.474
TPT	6.353.928	2.474
GPDRBADHK	1.818.563	2.474

*Sumber: Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.28 maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel BS, BM, APM SMA serta TPT yang signifikan ( $> F_{0,05;6;26} : 2.474$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPM} = & 2.905.096.426(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{BS}6.321.561(\text{longitude}_i, \\ & \text{latitude}_i) + x_{BM} 3.280.098(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APMSMA} \\ & 157.868.733.200(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{TPT}6.353.928(\text{longitude}_i, \\ & \text{latitude}_i) + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.321.561 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426. Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi



nilai PPM sebanyak 3.280.098 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426. selanjutnya variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 157.868.733.200 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426 serta variabel TPT sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.353.928 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 2.905.096.426.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS, variabel BM, variabel APM SMA dan variabel TPT mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020.

**Tabel 5. 22 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hit</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	3.469	2.490
Variabel		
Intercept	30.181.952	2.490
BS	-0.021837	2.490
BM	1.860.271	2.490
APM SMA	8.194.010	2.490
TPT	41.127.031	2.490
GPDRBADHK	3.629.608	2.490

*Sumber : Hasil menggunakan software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.22 di atas sama halnya saat melakukan uji kesesuaian di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat



pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel APM SMA, TPT serta GPDRBADHK yang signifikan ( $> F_{0,05;6;27} : 2.490$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PPM = & 30.181.952 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APM \text{ SMA}} 8.194.010 (\text{longitude}_i, \\ & \text{latitude}_i) + x_{TPT} 41.127.031(\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{GPDRBADHK} \\ & 3.629.608 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 8.194.010 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 30.181.952. Kemudian variabel TPT sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 41.127.031 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 30.181.952. serta variabel GPRBADHK sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 3.629.608 persen dan jikaseluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 30.181.952.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel APM SMA, variabel TPT serta variabel GPDRBADHK mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010.



**Tabel 5. 23 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hit</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	0.989407	2.490
<b>Variabel</b>		
Intercept	13.409.502	2.490
BS	0.102434	2.490
BM	6.823.933	2.490
APM SMA	21.208.677	2.490
TPT	0.857377	2.490
GPDRBADHK	2.875.751	2.490

*Sumber: Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.23 di atas sama halnya saat melakukan uji kesesuaian di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel GPDRBADHK yang signifikan ( $> F_{0,05;6;27} : 2.490$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$PPM = 13.409.502 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{BM} 6.823.933 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APM\ SMA} 21.208.677 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{GPDRBADHK} 2.875.751 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + \varepsilon_i$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.823.933 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502. Kemudian variabel APM SMA sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM



sebanyak 21.208.677 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502. serta variabel GPRBADHK sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 2.875.751 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar 13.409.502.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel APM SMA, variabel TPT serta variabel GPDRBADHK mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015.

**Tabel 5. 24 Uji Kesesuaian Model GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020**

<b>Model</b>	<b>F<sub>hit</sub></b>	<b>F<sub>tabel</sub></b>
GWR	2.200.652	2.490
Variabel		
Intercept	-67.831.969.778	2.490
BS	2.678.330	2.490
BM	10.960.929	2.490
APM SMA	6.989.732.802	2.490
TPT	11.687.457	2.490
GPDRBADHK	0.173211	2.490

*Sumber: Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.24 di atas sama halnya saat melakukan uji kesesuaian di wilayah perdesaan maka dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  diperoleh bahwa  $H_0$  ditolak yang artinya terdapat pengaruh faktor geografis sehingga GWR sudah tepat digunakan untuk memodelkan kemiskinan di Indonesia.

Dengan memperhatikan nilai  $F_{hitung}$  pada setiap variabel, didapat bahwa intersep, variabel BS, variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel TPT yang



signifikan ( $> F_{0,05;6;27} : 2.490$ ) sehingga jika dilakukan pemodelan ulang, didapat formula baru sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPM} = & -67.831.969.778 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{BS} 2.678.330 (\text{longitude}_i, \\ & \text{latitude}_i) + x_{BM} 10.960.9297 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{APM \text{ SMA}} \\ & 6.989.732.802 (\text{longitude}_i, \text{latitude}_i) + x_{TPT} 11.687.457 (\text{longitude}_i, \\ & \text{latitude}_i) + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Model ini memiliki makna setiap perubahan nilai pada variabel BS sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 2.678.330 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778. Kemudian variabel BM sebesar 1 persen, akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 10.960.9297 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778. Selanjutnya variabel APM SMA sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 6.989.732.802 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778 serta variabel TPT sebesar 1 persen akan mempengaruhi nilai PPM sebanyak 11.687.457 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai PPM sebesar -67.831.969.778.

Berdasarkan model baru yang diperoleh, didapatkan hasil bahwa variabel BS, Variabel BM, variabel APM SMA, serta variabel TPT mempengaruhi terhadap kenaikan angka PPM di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020.



## 5.5 Pengujian Parameter Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh

### Provinsi Indonesia Tahun 2010, 2015 dan 2020

Uji parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial yang digunakan untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perdesaan setiap provinsi di Indonesia dengan hipotesisnya adalah:

$H_0: (u_i, v_i) = 0$  (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin)

$H_1: (u_i, v_i) \neq 0$  dengan  $j = 0,1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 33$  (ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin)

Satu parameter di wilayah perdesaan dikatakan signifikan jika nilai  $T_{hit} > t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$ . Nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,703 sedangkan di wilayah perkotaan Nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,706. Hal ini berarti jika  $t_{hit}$  pada masing-masing parameter lebih besar dari 1,703 dan 1,706 maka variabel bebas tersebut memberikan pengaruh terhadap variabel ( $Y$ ) tersebut.

Sedangkan hipotesis di wilayah perkotaan juga berbeda dengan perdesaan karena terdapat satu Provinsi yang tidak memiliki Kota, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga hipotesis di wilayah perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$H_0: (u_i, v_i) = 0$  (tidak ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin)

$H_1: (u_i, v_i) \neq 0$  dengan  $j = 0,1,2,3$  dan  $i = 1,2, \dots, 32$  (ada pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap persentase penduduk miskin).



Tabel 5. 25 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010

Provinsi	$T_{hit}$				GPDRB ADHK
	BS	BM	APM SMA	TPT	
Aceh	-0.429916	-0.810758	1.259.225	0.081911	-1.121.322
Sumatera Utara	-0.433207	-0.811853	1.283.224	0.06183	-1.080.928
Sumatera Barat	-0.426499	-0.807363	1.298.823	0.019703	-1.028.835
Riau	-0.408666	-0.795561	1.294.044	-0.026359	-0.997028
Jambi	-0.383053	-0.780993	1.274.121	-0.063923	-1.005.493
Sumatera Selatan	-0.323386	-0.739335	1.221.431	-0.133172	-1.056.726
Bengkulu	-0.346928	-0.762479	1.240.099	-0.096172	-1.063.457
Lampung	-0.278715	-0.696731	1.181.307	-0.186965	-1.078.467
Kepulauan Bangka Belitung	-0.253047	-0.655671	1.163.966	-0.253222	-0.953098
Kepulauan Riau	-0.259993	-0.663301	1.169.809	-0.243086	-0.961522
Jawa Barat	-0.079368	-0.459447	0.990716	-0.36464	-1.294.208
Jawa Tengah	0.023637	-0.355182	0.915549	-0.496506	-1.086.757
Daerah Istimewa Yogyakarta	0.00996	-0.366386	0.924103	-0.482209	-1.107.915
Jawa Timur	0.205826	-0.179571	0.791888	-0.632902	-1.053.600
Banten	-0.212848	-0.627199	1.119.394	-0.255619	-1.127.079
Bali	0.548321	0.114	0.609536	-0.821884	-1.035.523
Nusa Tenggara Barat	0.805161	0.631282	0.429457	-0.864368	-1.347.752
Nusa Tenggara Timur	1.759.031	0.926458	0.223106	-1.145.937	-0.941142
Kalimantan Barat	-0.034041	-0.460085	0.999456	-0.486428	-0.791964
Kalimantan Tengah	0.368377	-0.158501	0.75453	-0.746498	-0.764961
Kalimantan Selatan	0.596726	0.005362	0.640462	-0.856416	-0.778387
Kalimantan Timur	0.860208	0.112658	0.551662	-0.962043	-0.674546
Kalimantan Utara	0.976283	0.254388	0.485579	-0.999771	-0.782349
Sulawesi Utara	2.361.340	0.851861	0.112809	-1.158.040	-0.615077
Sulawesi Tengah	1.933.518	0.681075	0.211981	-1.176.083	-0.647463
Sulawesi Selatan	2.166.473	1.074.440	0.141682	-1.163.463	-0.846391
Sulawesi Tenggara	1.820.655	0.759549	0.227531	-1.168.404	-0.773683
Gorontalo	1.530.921	1.725.267	0.207892	-0.801453	-1.409.414
Sulawesi Barat	1.631.708	0.624287	0.280989	-1.149.485	-0.751358
Maluku	2.905.733	1.186.086	0.027766	-0.980706	-0.640507
Maluku Utara	2.767.281	0.937769	0.037076	-1.059.133	-0.552907
Papua Barat	3.191.695	0.887523	-0.019202	-0.740377	-0.381824
Papua	3.175.295	0.75518	-0.035204	-0.522563	-0.168427

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perdesaan Tahun 2010 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.26 sebagai berikut:

**Tabel 5. 26 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2010**

<b>Provinsi</b>	<b>Variabel yang Signifikan</b>
Lampung	APM SMA
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	BS
Gorontalo	BM
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali	

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.26 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2) dan Angka Partisipasi Murni SMA (X3). Namun terdapat banyak Provinsi yakni 16 Provinsi yang tidak mempunyai variabel yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh Provinsi tersebut, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali

**Tabel 5. 27 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015**

Provinsi	$T_{hit}$				
	BS	BM	APM SMA	TPT	GPDRB ADHK
Aceh	-0.716501	-0.396853	1705512	0.207255	-0.028589
Sumatera Utara	-0.698822	-0.470277	1689682	0.188938	-0.014255
Sumatera Barat	-0.658214	-0.570629	1640741	0.157638	0.005257
Riau	-0.60763	-0.645134	1574550	0.125418	0.018133
Jambi	-0.559052	-0.687083	1510657	0.098573	0.011984
Sumatera Selatan	-0.452246	-0.749274	1369489	0.040354	-0.019571
Bengkulu	-0.508436	-0.710344	1444121	0.072942	-0.021828
Lampung	-0.508436	-0.710344	1444121	0.072942	-0.021828
Kepulauan Bangka Belitung	-0.24865	-0.840963	1112276	-0.069326	0.044114
Kepulauan Riau	-0.267619	-0.835735	1134993	-0.059896	0.038473
Jawa Barat	0.082522	-0.926283	0.667308	-0.259454	-0.185545
Jawa Tengah	0.428228	-0.958124	0.346458	-0.371529	-0.024743
Daerah Istimewa Yogyakarta	0.388263	-0.958336	0.378101	-0.361087	-0.042048
Jawa Timur	0.920583	-0.981226	-0.054341	-0.504391	0.023872
Banten	-0.214662	-0.845875	1056751	-0.091729	-0.066664
Bali	1799079	-1007523	-0.594402	-0.623264	0.087491
Nusa Tenggara Barat	2513075	-1247904	-1167566	-0.738966	-0.176926
Nusa Tenggara Timur	3509394	-1215625	-1604706	-0.226237	0.249388
Kalimantan Barat	0.291275	-0.882097	0.57443	-0.282734	0.169649
Kalimantan Tengah	1242797	-0.876165	-0.104164	-0.49577	0.250292
Kalimantan Selatan	1780608	-0.880477	-0.408483	-0.55146	0.279639
Kalimantan Timur	2276793	-0.827012	-0.573706	-0.536679	0.384413
Kalimantan Utara	2567812	-0.896608	-0.798334	-0.548543	0.333782
Sulawesi Utara	3693403	-1192309	-1789070	0.224328	0.516596
Sulawesi Tengah	3587911	-0.991912	-1423200	-0.137463	0.507139
Sulawesi Selatan	3611996	-1340268	-1865161	0.111638	0.316131
Sulawesi Tenggara	3538112	-1068631	-1475404	-0.201242	0.407102
Gorontalo	3184123	-1686651	-1685748	-0.252394	-0.226803
Sulawesi Barat	3412854	-0.984041	-1298144	-0.318986	0.419352
Maluku	3529652	-1881285	-2466661	1.046.553	0.325742
Maluku Utara	3656595	-1505839	-2193296	0.700107	0.49206
Papua Barat	3455809	-2140100	-2380911	1.527.425	0.347557
Papua	3405147	-2333140	-2099768	1.815.760	0.275301

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perdesaan Tahun 2015 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.28 sebagai berikut:

**Tabel 5. 28 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Indonesia Tahun 2015**

<b>Provinsi</b>	<b>Variabel yang Signifikan</b>
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat	BS
Maluku, Papua Barat	BS, BM dan APM
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara	BS & APM
Aceh	APM SMA
Papua	BS, BM, APM dan TPT

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.28 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipas Murni SMA/MA (X3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X4). Sedangkan untuk Provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera tidak mempunyai variabel yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh Provinsi tersebut.

**Tabel 5. 29 Uji Masing-masing Parameter GWR Wilayah Desa Indonesia Tahun 2020**

Provinsi	$T_{hit}$				
	BS	BM	APM SMA	TPT	GPDRB ADHK
Aceh	0.534603	-0.07037	-3227978	-0.77122	1.665.415
Sumatera Utara	0.548355	-0.063284	-3242200	-0.768205	1.661.953
Sumatera Barat	0.565894	-0.05279	-3255212	-0.766668	1.655.336
Riau	0.578501	-0.043746	-3260268	-0.768145	1.648.603
Jambi	0.58415	-0.037338	-3258131	-0.773177	1.643.111
Sumatera Selatan	0.591012	-0.026196	-3249290	-0.785492	1.632.971
Bengkulu	0.584052	-0.03227	-3249500	-0.782742	1.637.986
Lampung	0.597939	-0.017831	-3244601	-0.792482	1.625.538
Kepulauan Bangka Belitung	0.616878	-0.009073	-3254437	-0.785133	1.618.873
Kepulauan Riau	0.614911	-0.010376	-3254214	-0.785187	1.620.000
Jawa Barat	0.610445	0.009466	-3212706	-0.82706	1.599.420
Jawa Tengah	0.6406	0.023782	-3223534	-0.816297	1.587.574
Daerah Istimewa Yogyakarta	0.637637	0.022422	-3222581	-0.817511	1.588.790
Jawa Timur	0.659203	0.039197	-3215565	-0.821158	1.572.577
Banten	0.60499	-0.007476	-3236004	-0.802918	1.616.005
Bali	0.683496	0.060801	-3199785	-0.829785	1.550.426
Nusa Tenggara Barat	0.681708	0.086259	-3147400	-0.878524	1.524.395
Nusa Tenggara Timur	0.74894	0.115204	-3154719	-0.843214	1.488.632
Kalimantan Barat	0.655089	0.016625	-3253526	-0.783917	1.594.865
Kalimantan Tengah	0.685692	0.043618	-3235428	-0.794153	1.567.202
Kalimantan Selatan	0.698159	0.055888	-3224391	-0.800543	1.554.171
Kalimantan Timur	0.716251	0.064685	-3225030	-0.791988	1.543.333
Kalimantan Utara	0.79459	0.129062	-3167803	-0.80222	1.464.130
Sulawesi Utara	0.79459	0.129062	-3167803	-0.80222	1.464.130
Sulawesi Tengah	0.76923	0.108964	-3186043	-0.801097	1.490.306
Sulawesi Selatan	0.774558	0.13126	-3145316	-0.837145	1.467.425
Sulawesi Tenggara	0.758644	0.109608	-3175107	-0.818294	1.492.257
Gorontalo	0.711448	0.141551	-3064440	-0.939702	1.465.020
Sulawesi Barat	0.750102	0.100114	-3186468	-0.812249	1.503.266
Maluku	0.837815	0.175485	-3109788	-0.827301	1.405.347
Maluku Utara	0.826025	0.153282	-3145643	-0.801183	1.430.762
Papua Barat	0.891179	0.209206	-3085738	-0.807283	1.351.114
Papua	0.937133	0.250183	-3039245	-0.812041	1.289.574

Sumber : Hasil Menggunakan Software, GWR, 2022



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perdesaan Tahun 2020 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.30 sebagai berikut:

**Tabel 5.30 Variabel yang Signifikan di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020**

<b>Provinsi</b>	<b>Variabel yang Signifikan</b>
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	APM SMA

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.30 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya hanya variabel Angka Partisipas Murni SMA/MA (X3) yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.

**Tabel 5. 31 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

Provinsi	$T_{hit}$				
	BS	BM	APM SMA	TPT	GPDRB ADHK
Aceh	-1463348	-0.444375	2.904951	2.380994	-0.857622
Sumatera Utara	-3066667	-1365955	3.425428	0.668331	-0.455798
Sumatera Barat	-1474302	-0.469446	2.912701	2.463843	-0.8018
Riau	-1484467	-0.486786	2.944950	2.649932	-0.718373
Jambi	-1477760	-0.473351	2.920903	2.511501	-0.781729
Sumatera Selatan	-1480486	-0.476539	2.929816	2.560926	-0.761502
Bengkulu	-1476567	-0.467499	2.922663	2.511332	-0.788777
Lampung	-1481008	-0.475542	2.934956	2.585282	-0.754409
Kepulauan Bangka Belitung	-1483875	-0.488135	2.933479	2.595800	-0.73571
Kepulauan Riau	-1481754	-0.483946	2.926415	2.555239	-0.75451
Jawa Barat	-1483347	-0.481917	2.944529	2.641668	-0.727123
Jawa Tengah	-1485797	-0.493556	2.953884	2.702064	-0.691293
Daerah Istimewa Yogyakarta	-1484505	-0.487333	2.953495	2.692907	-0.702095
Jawa Timur	-1487677	-0.511056	2.965991	2.780048	-0.640495
Banten	-1482209	-0.478204	2.940139	2.614912	-0.740981
Bali	-1487565	-0.51795	2.972098	2.816126	-0.617775
Nusa Tenggara Barat	-1487889	-0.532055	2.978828	2.861390	-0.581995
Nusa Tenggara Timur	-1484530	-0.567712	2.999431	2.984780	-0.483562
Kalimantan Barat	-1488751	-0.507941	2.941936	2.663925	-0.687764
Kalimantan Tengah	-1491214	-0.528288	2.960479	2.774320	-0.621685
Kalimantan Selatan	-1490896	-0.529225	2.963634	2.789520	-0.614606
Kalimantan Timur	-1492731	-0.550882	2.968010	2.833747	-0.569998
Kalimantan Utara	-1491286	-0.547398	2.973092	2.851575	-0.567121
Sulawesi Utara	-1490389	-0.6016	2.990590	2.977933	-0.443605
Sulawesi Tengah	-1492080	-0.575985	2.979720	2.909844	-0.506518
Sulawesi Selatan	-1492350	-0.567456	2.976322	2.886941	-0.527114
Sulawesi Tenggara	-1489239	-0.576483	2.989286	2.949291	-0.488711
Gorontalo	-1491441	-0.59122	2.985229	2.947258	-0.470696
Maluku	-1486608	-0.639343	3.012499	3.087817	-0.342615
Maluku Utara	-1489038	-0.625857	2.999410	3.031840	-0.387142
Papua Barat	-1489216	-0.656891	3.009036	3.087257	-0.319681
Papua	-1513693	-0.728139	3.039841	3.186688	-0.17565

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perkotaan Tahun 2010 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.31 sebagai berikut:

**Tabel 5. 32 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2010**

Provinsi	Variabel yang Signifikan
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaliamantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Papua	APM SMA dan TPT
Sumatera Utara	APM SMA dan BS

Sumatera : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022

Berdasarkan Tabel 5.31 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah Angka Partisipas Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Bantuan Sosial (X1) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010.



**Tabel 5. 33 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

Provinsi	$T_{hit}$				
	BS	BM	APM SMA	TPT	GPDRB ADHK
Aceh	-0.310384	-1057186	0.530562	2699298	-0.527601
Sumatera Utara	0.58591	-0.693514	1250396	3084863	-0.501648
Sumatera Barat	-0.295391	-0.991685	0.565536	2740227	-0.428779
Riau	-0.227393	-0.8817	0.581945	2776405	-0.235773
Jambi	-0.277574	-0.963522	0.571296	2751042	-0.380011
Sumatera Selatan	-0.258295	-0.935465	0.574644	2759854	-0.330082
Bengkulu	-0.272473	-0.9689	0.564188	2745018	-0.385451
Lampung	-0.246482	-0.924102	0.572522	2760967	-0.307855
Kepulauan Bangka Belitung	-0.25295	-0.907195	0.587442	2774633	-0.285867
Kepulauan Riau	-0.267399	-0.93145	0.58381	2766801	-0.328497
Jawa Barat	-0.22678	-0.890226	0.576669	2771044	-0.248283
Jawa Tengah	-0.209814	-0.850014	0.584506	2784518	-0.179824
Daerah Istimewa Yogyakarta	-0.208417	-0.860155	0.577975	2778036	-0.194523
Jawa Timur	-0.189727	-0.796438	0.593429	2800729	-0.089161
Banten	-0.235529	-0.90687	0.57413	2765802	-0.277206
Bali	-0.179164	-0.773055	0.594337	2805591	-0.048689
Nusa Tenggara Barat	-0.170478	-0.738787	0.600367	2815641	0.007244
Nusa Tenggara Timur	-0.142175	-0.64954	0.602264	2831950	0.153311
Kalimantan Barat	-0.239851	-0.854632	0.606473	2797991	-0.201313
Kalimantan Tengah	-0.20758	-0.782293	0.615364	2817531	-0.076555
Kalimantan Selatan	-0.201408	-0.774369	0.613557	2817834	-0.061529
Kalimantan Timur	-0.199841	-0.732304	0.629523	2835018	0.00232
Kalimantan Utara	-0.188479	-0.728005	0.621073	2830633	0.014549
Sulawesi Utara	-0.173943	-0.617775	0.642184	2860500	0.183611
Sulawesi Tengah	-0.185531	-0.673053	0.637539	2849441	0.097495
Sulawesi Selatan	-0.18915	-0.69179	0.634714	2844812	0.068031
Sulawesi Tenggara	-0.166936	-0.655934	0.625138	2844910	0.131991
Gorontalo	-0.180355	-0.641297	0.642139	2856954	0.146473
Maluku	-0.147489	-0.534836	0.631413	2866773	0.311794
Maluku Utara	-0.166471	-0.570585	0.645141	2868904	0.253876
Papua Barat	-0.161007	-0.516325	0.64818	2877903	0.330112
Papua	-0.142525	-0.40301	0.637397	2888485	0.477307

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perkotaan Tahun 2015 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.33 sebagai berikut:

**Tabel 5. 34 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2015**

<b>Provinsi</b>	<b>Variabel yang Signifikan</b>
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	TPT

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.33 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya hanya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015.

Tabel 5. 35 Uji Masing-masing Parameter GWR di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020

Provinsi	$T_{hit}$				
	BS	BM	APM SMA	TPT	GPDRB ADHK
Aceh	0.476237	1844094	-1067351	1023562	2.016.219
Sumatera Utara	-0.002588	-0.180762	0.438752	2580119	0.782589
Sumatera Barat	0.458664	1785139	-1109782	1115190	2.031.301
Riau	0.426135	1672855	-1128381	1293784	2.025.814
Jambi	0.450711	1757541	-1115023	1160222	2.030.155
Sumatera Selatan	0.442527	1729014	-1117903	1206429	2.027.786
Bengkulu	0.45225	1761822	-1104587	1155425	2.025.333
Lampung	0.439144	1716654	-1114256	1227194	2.024.389
Kepulauan Bangka Belitung	0.434055	1701541	-1136299	1246797	2.033.188
Kepulauan Riau	0.441368	1726571	-1131710	1207422	2.034.318
Jawa Barat	0.428802	1681118	-1120408	1282439	2.023.038
Jawa Tengah	0.416037	1638412	-1134036	1345889	2.024.371
Daerah Istimewa Yogyakarta	0.419315	1648400	-1123886	1332559	2.020.890
Jawa Timur	0.398226	1579493	-1153177	1430505	2.026.067
Banten	0.433931	1698594	-1116429	1255634	2.023.225
Bali	0.390157	1552481	-1158416	1468837	2.025.287
Nusa Tenggara Barat	0.378023	1513284	-1173763	1521873	2.027.118
Nusa Tenggara Timur	0.344506	1403625	-1200022	1665428	2.024.989
Kalimantan Barat	0.41768	1648471	-1165926	1324082	2.039.884
Kalimantan Tengah	0.393547	1568461	-1186735	1440423	2.038.505
Kalimantan Selatan	0.390764	1558742	-1185417	1454856	2.036.797
Kalimantan Timur	0.376058	1513434	-1216531	1514027	2.043.112
Kalimantan Utara	0.374336	1505816	-1205320	1526799	2.038.069
Sulawesi Utara	0.332593	1375423	-1265872	1691127	2.042.040
Sulawesi Tengah	0.354152	1443683	-1242633	1605552	2.043.443
Sulawesi Selatan	0.361195	1465902	-1233575	1577016	2.043.196
Sulawesi Tenggara	0.347286	1418364	-1229885	1641432	2.036.244
Gorontalo	0.341948	1405416	-1258447	1653591	2.043.630
Maluku	0.297609	1261176	-1278793	1828126	2.031.121
Maluku Utara	0.313291	1314768	-1285950	1763488	2.039.771
Papua Barat	0.289974	1242010	-1309433	1845449	2.035.657
Papua	0.235344	1064360	-1325085	2025756	2.012.200

Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022



Untuk melihat variabel yang signifikan pada model GWR di wilayah perkotaan Tahun 2020 untuk setiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 7.35 sebagai berikut:

**Tabel 5. 36 Variabel yang Signifikan di Wilayah Kota Indonesia Tahun 2020**

Provinsi	Variabel yang Signifikan
Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau	BM DAN GPDRBADHK
Sumatera Utara	TPT
Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo	GPDRBADHK
Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua	TPT dan PDRB

*Sumber : Hasil Menggunakan Software GWR, 2022*

Berdasarkan Tabel 5.35 di atas bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan menggunakan model GWR pada umumnya adalah variabel Belanja Modal (X2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan PDRB menurut ADHK (X5) yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia Sedangkan untuk variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain tidak ada variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.

### 5.37 Model GWR di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia

Tahun 2010, 2015 dan 2020

Tabel 5. 30 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y} = 11655873$	-0.76339	-0.12986	0.218916	0.042978	-0.73579
Sumatera Utara	$\hat{Y} = 11307080$	-0.75831	-0.12621	0.217767	0.031548	-0.6709
Sumatera Barat	$\hat{Y} = 11054255$	-0.72866	-0.12104	0.213026	0.009673	-0.59512
Riau	$\hat{Y} = 11047677$	-0.68229	-0.11634	0.206452	-0.01256	-0.54804
Jambi	$\hat{Y} = 11249729$	-0.62954	-0.11273	0.199766	-0.02994	-0.53594
Sumatera Selatan	$\hat{Y} = 11778225$	-0.51906	-0.10487	0.186407	-0.06089	-0.53725
Bengkulu	$\hat{Y} = 11661652$	-0.56532	-0.10943	0.192407	-0.04469	-0.55508
Lampung	$\hat{Y} = 12090591$	-0.43939	-0.09761	0.176796	-0.08394	-0.5315
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y} = 11855700$	-0.38478	-0.09015	0.169895	-0.11022	-0.45815
Kepulauan Riau	$\hat{Y} = 11846452$	-0.39709	-0.09139	0.171258	-0.10618	-0.46369
Jawa Barat	$\hat{Y} = 13568581$	-0.12112	-0.06292	0.142584	-0.15762	-0.59753
Jawa Tengah	$\hat{Y} = 13290078$	0.033596	-0.04755	0.128224	-0.20564	-0.49477
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y} = 13322108$	0.014258	-0.04914	0.129691	-0.20049	-0.50467
Jawa Timur	$\hat{Y} = 13539109$	0.279598	-0.02376	0.109828	-0.25616	-0.47798
Banten	$\hat{Y} = 12558874$	-0.32927	-0.08683	0.164189	-0.11261	-0.53817
Bali	$\hat{Y} = 13774367$	0.707425	0.014902	0.084396	-0.32708	-0.47254
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y} = 14774689$	1067569	0.082616	0.061875	-0.35115	-0.64012
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y} = 12784203$	2194137	0.121378	0.032025	-0.4801	-0.44314
Kalimantan Barat	$\hat{Y} = 12096265$	-0.04726	-0.06139	0.139721	-0.19936	-0.36707
Kalimantan Tengah	$\hat{Y} = 12647996$	0.47544	-0.0208	0.10382	-0.29654	-0.35016
Kalimantan Selatan	$\hat{Y} = 12850031$	0.75274	0.0007	0.088111	-0.33882	-0.35605
Kalimantan Timur	$\hat{Y} = 12521743$	1065027	0.014706	0.076042	-0.38198	-0.31033
Kalimantan Utara	$\hat{Y} = 12907968$	1204909	0.033121	0.067158	-0.39785	-0.35915
Sulawesi Utara	$\hat{Y} = 11372642$	3035998	0.115943	0.01686	-0.53132	-0.28842
Sulawesi Tengah	$\hat{Y} = 11937446$	2411158	0.090414	0.030433	-0.50564	-0.30129
Sulawesi Selatan	$\hat{Y} = 11966270$	2758106	0.143496	0.020878	-0.51153	-0.40075
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y} = 12347522$	2260005	0.100003	0.032504	-0.49299	-0.36037
Gorontalo	$\hat{Y} = 13040999$	2172313	0.234186	0.037511	-0.38793	-0.74151
Sulawesi Barat	$\hat{Y} = 12475742$	2010586	0.081827	0.039699	-0.47646	-0.34837
Maluku	$\hat{Y} = 10130252$	4038311	0.173778	0.004645	-0.50729	-0.31035
Maluku Utara	$\hat{Y} = 10659781$	3729704	0.133628	0.005942	-0.53203	-0.26222
Papua Barat	$\hat{Y} = 9407653$	4805664	0.146597	-0.00374	-0.44159	-0.19021
Papua	$\hat{Y} = 8667246$	5211828	0.145311	-0.00793	-0.33992	-0.0898

$$\hat{Y}_{\text{Papua}} = 8667246 + 5211828 + 0.145311 - 0.00793 - 0.33992 - 0.0898$$



Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 59.71 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 8667246 persen yang artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naik sebesar 8667246 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 5211828 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan provinsi Papua sebesar 5211828 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai 0.145311 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.145311 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -0.00793 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.00793 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai -0.33992 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.33992 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai -0.0898 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GPRB ADHK, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.0898 persen.



**Tabel 5. 38 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015**

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y} = -8.167.946$	-1.865.056	-0.09337	0.376344	0.133493	-0.0237
Sumatera Utara	$\hat{Y} = -6.925.001$	-1.771.916	-0.10562	0.359231	0.119724	-0.01103
Sumatera Barat	$\hat{Y} = -5.029.919$	-1.609.204	-0.12117	0.332391	0.097628	0.003684
Riau	$\hat{Y} = -3.325.086$	-1.442.140	-0.13206	0.307568	0.076217	0.011752
Jambi	$\hat{Y} = -2.004.236$	-1.303.508	-0.13838	0.288631	0.059165	0.007438
Sumatera Selatan	$\hat{Y} = 0.538855$	-1.024.034	-0.14814	0.252494	0.023746	-0.01141
Bengkulu	$\hat{Y} = -0.774733$	-1.175.618	-0.14289	0.272275	0.043438	-0.0133
Lampung	$\hat{Y} = -0.774733$	-1.175.618	-0.14289	0.272275	0.043438	-0.0133
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y} = 4.170.251$	-0.521319	-0.15816	0.193026	-0.03938	0.022799
Kepulauan Riau	$\hat{Y} = 3.887.617$	-0.564723	-0.15766	0.197776	-0.03411	0.020034
Jawa Barat	$\hat{Y} = 10.451.047$	0.167141	-0.17666	0.11201	-0.14533	-0.09363
Jawa Tengah	$\hat{Y} = 13.259.102$	0.77548	-0.17462	0.055672	-0.20238	-0.01171
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y} = 13.013.681$	0.711575	-0.17523	0.060953	-0.19716	-0.01998
Jawa Timur	$\hat{Y} = 17.069.283$	1.498.537	-0.17599	-0.008546	-0.27136	0.011095
Banten	$\hat{Y} = 5.237.001$	-0.457301	-0.16235	0.183779	-0.05231	-0.03528
Bali	$\hat{Y} = 22.002.129$	2.512.699	-0.17838	-0.092354	-0.33549	0.040629
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y} = 30.714.708$	3.327.128	-0.22309	-0.193322	-0.41743	-0.08561
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y} = 31.054.668$	4.277.914	-0.21676	-0.250673	-0.13421	0.120629
Kalimantan Barat	$\hat{Y} = 9.842.799$	0.52323	-0.15955	0.093618	-0.1537	0.079935
Kalimantan Tengah	$\hat{Y} = 16.122.346$	1.843.808	-0.15595	-0.01633	-0.26443	0.115895
Kalimantan Selatan	$\hat{Y} = 18.829.817$	2.432.103	-0.15608	-0.063423	-0.29489	0.12983
Kalimantan Timur	$\hat{Y} = 19.621.873$	2.903.065	-0.1471	-0.089036	-0.28973	0.179779
Kalimantan Utara	$\hat{Y} = 22.158.135$	3.196.127	-0.15868	-0.12313	-0.29822	0.156472
Sulawesi Utara	$\hat{Y} = 30.493.889$	4.682.652	-0.22656	-0.277296	0.148233	0.255142
Sulawesi Tengah	$\hat{Y} = 26.803.851$	4.348.514	-0.18136	-0.218812	-0.08284	0.245896
Sulawesi Selatan	$\hat{Y} = 33.141.212$	4.557.275	-0.24518	-0.29134	0.070838	0.155123
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y} = 28.208.756$	4.280.387	-0.19236	-0.227132	-0.11921	0.196517
Gorontalo	$\hat{Y} = 44.790.138$	4.200.642	-0.3331	-0.366832	-0.16789	-0.14206
Sulawesi Barat	$\hat{Y} = 26.331.849$	4.082.728	-0.17619	-0.199596	-0.18396	0.200962
Maluku	$\hat{Y} = 42.300.934$	4.924.430	-0.40332	-0.431255	0.86374	0.166113
Maluku Utara	$\hat{Y} = 35.941.713$	4.915.441	-0.30989	-0.357074	0.532146	0.248559
Papua Barat	$\hat{Y} = 49.783.079$	5.150.410	-0.57147	-0.53961	1.600.325	0.183852
Papua	$\hat{Y} = 56.140.367$	5.359.861	-0.75305	-0.613	2.307.979	0.149782

$$\hat{Y}_{\text{Papua}} = 56.140.367 + 5.359.861 - 0.75305 - 0.613 + 2.307.979 + 0.149782$$

Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 63.06 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 56.140.367 persen yang



artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naik sebesar 56.140.367 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 5.359.861 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan provinsi Papua sebesar 5.359.861 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai - 0.75305 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.75305 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -0.613 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaana Provinsi Papua sebesar 0.613 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 2.307.979 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaaan Provinsi Papua sebesar 2.307.979 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai 0.149782 yang berarti dengan meningkatnyapertumbuhan GDPRB ADHK, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.149782 persen.



**Tabel 5. 31 Model GWR di Wilayah Desa Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020**

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y} = 126.873.430$	0.54668	-0.02014	-1.842.404	-0.48096	0.557954
Sumatera Utara	$\hat{Y} = 126.576.959$	0.560165	-0.01808	-1.838.503	-0.47873	0.555573
Sumatera Barat	$\hat{Y} = 126.111.175$	0.577367	-0.01506	-1.832.023	-0.47734	0.551922
Riau	$\hat{Y} = 125.681.322$	0.589724	-0.01246	-1.825.729	-0.47795	0.54871
Jambi	$\hat{Y} = 125.321.048$	0.595216	-0.01063	-1.820.023	-0.48088	0.54642
Sumatera Selatan	$\hat{Y} = 124.647.770$	0.601825	-0.00745	-1.809.031	-0.48823	0.542459
Bengkulu	$\hat{Y} = 124.948.794$	0.595006	-0.00919	-1.813.618	-0.4867	0.544613
Lampung	$\hat{Y} = 124.187.519$	0.608573	-0.00507	-1.801.697	-0.49237	0.539498
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y} = 123.956.904$	0.627351	-0.00258	-1.799.327	-0.48758	0.5363
Kepulauan Riau	$\hat{Y} = 124.007.906$	0.625406	-0.00295	-1.800.039	-0.48764	0.536774
Jawa Barat	$\hat{Y} = 122.527.222$	0.620589	0.002687	-1.774.144	-0.51339	0.529985
Jawa Tengah	$\hat{Y} = 122.187.059$	0.650588	0.006744	-1.770.744	-0.50641	0.524736
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y} = 122.215.927$	0.647635	0.006359	-1.770.996	-0.50718	0.525249
Jawa Timur	$\hat{Y} = 121.550.940$	0.669085	0.011109	-1.761.280	-0.50928	0.519166
Banten	$\hat{Y} = 123.597.476$	0.615423	-0.00212	-1.792.128	-0.49863	0.535855
Bali	$\hat{Y} = 120.654.603$	0.693351	0.017225	-1.747.754	-0.51457	0.511323
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y} = 118.966.500$	0.69146	0.024445	-1.718.240	-0.54513	0.503116
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y} = 118.627.068$	0.759522	0.032669	-1.717.966	-0.52341	0.490887
Kalimantan Barat	$\hat{Y} = 122.985.063$	0.665256	0.004714	-1.785.816	-0.48641	0.526788
Kalimantan Tengah	$\hat{Y} = 121.835.207$	0.69572	0.012359	-1.768.510	-0.49253	0.516838
Kalimantan Selatan	$\hat{Y} = 121.300.332$	0.708186	0.015833	-1.760.285	-0.49646	0.512339
Kalimantan Timur	$\hat{Y} = 121.126.566$	0.726414	0.018325	-1.758.870	-0.49122	0.508645
Kalimantan Utara	$\hat{Y} = 118.795.428$	0.806066	0.03664	-1.725.140	-0.49838	0.483453
Sulawesi Utara	$\hat{Y} = 118.795.428$	0.806066	0.03664	-1.725.140	-0.49838	0.483453
Sulawesi Tengah	$\hat{Y} = 119.480.823$	0.7801	0.030902	-1.734.842	-0.49728	0.491519
Sulawesi Selatan	$\hat{Y} = 118.200.151$	0.785693	0.037255	-1.712.756	-0.51998	0.484268
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y} = 119.199.875$	0.76934	0.03108	-1.728.911	-0.50788	0.492045
Gorontalo	$\hat{Y} = 116.154.030$	0.721877	0.04019	-1.671.575	-0.58474	0.484386
Sulawesi Barat	$\hat{Y} = 119.608.379$	0.760633	0.028379	-1.735.316	-0.50401	0.495545
Maluku	$\hat{Y} = 116.909.613$	0.851046	0.049983	-1.695.874	-0.51523	0.465737
Maluku Utara	$\hat{Y} = 118.010.126$	0.838495	0.043591	-1.714.273	-0.49838	0.473453
Papua Barat	$\hat{Y} = 116.083.807$	0.906858	0.059824	-1.686.518	-0.50426	0.450279
Papua	$\hat{Y} = 114.658.075$	0.956168	0.071934	-1.665.816	-0.50937	0.432843

$$\hat{Y}_{\text{Papua}} = 114.658.075 + 0.956168 + 0.071934 - 1.665.816 - 0.50937 + 0.432843$$



Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 41.62 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 114.658.075 persen yang artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua naik sebesar 114.658.075 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 0.956168 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan provinsi Papua sebesar 0.956168 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai 0.071934 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan menaikkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.071934 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -1.665.816 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 1.665.816 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai -0.50937 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.50937 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai 0.432843 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GDPRB ADHK, maka

akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Provinsi Papua sebesar 0.432843 persen.

**Tabel 5. 40 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2010**

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y}=-9.500.589$	-1.019.771	-0.03912	0.324439	0.641701	-0.37484
Sumatera Utara	$\hat{Y}=-11.392.241$	-3.383.771	-0.15274	0.603837	0.198507	-0.30215
Sumatera Barat	$\hat{Y}=-9.788.345$	-1.023.832	-0.04122	0.32419	0.657677	-0.34777
Riau	$\hat{Y}=-10.553.174$	-1.026.239	-0.04259	0.32621	0.698453	-0.30818
Jambi	$\hat{Y}=-9.973.832$	-1.024.817	-0.04152	0.32461	0.667864	-0.33799
Sumatera Selatan	$\hat{Y}=-10.174.387$	-1.025.439	-0.04176	0.325163	0.67868	-0.32828
Bengkulu	$\hat{Y}=-9.978.385$	-1.024.205	-0.04101	0.32485	0.668193	-0.34118
Lampung	$\hat{Y}=-10.278.157$	-1.025.334	-0.04166	0.325567	0.684239	-0.32483
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y}=-10.313.754$	-1.026.707	-0.04274	0.325239	0.68592	-0.31637
Kepulauan Riau	$\hat{Y}=-10.144.619$	-1.026.205	-0.0424	0.32478	0.676978	-0.32521
Jawa Barat	$\hat{Y}=-10.519.430$	-1.025.747	-0.04218	0.326244	0.696801	-0.31213
Jawa Tengah	$\hat{Y}=-10.788.731$	-1.026.308	-0.04316	0.326947	0.710355	-0.29585
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y}=-10.749.469$	-1.025.704	-0.04262	0.326986	0.708508	-0.30068
Jawa Timur	$\hat{Y}=-11.160.482$	-1.026.655	-0.04465	0.328051	0.728368	-0.27325
Banten	$\hat{Y}=-10.403.990$	-1.025.523	-0.04187	0.325933	0.690842	-0.31854
Bali	$\hat{Y}=-11.343.385$	-1.026.407	-0.04524	0.32872	0.736997	-0.26329
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y}=-11.582.586$	-1.026.577	-0.04646	0.329521	0.747845	-0.24778
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y}=-12.304.727$	-1.025.881	-0.04959	0.332679	0.778752	-0.20587
Kalimantan Barat	$\hat{Y}=-10.604.326$	-1.028.462	-0.04442	0.325675	0.700705	-0.29456
Kalimantan Tengah	$\hat{Y}=-11.127.531$	-1.028.845	-0.04614	0.327349	0.726342	-0.2651
Kalimantan Selatan	$\hat{Y}=-11.204.457$	-1.028.566	-0.04622	0.327694	0.730034	-0.26198
Kalimantan Timur	$\hat{Y}=-11.435.335$	-1.029.740	-0.0481	0.328187	0.740436	-0.24266
Kalimantan Utara	$\hat{Y}=-11.530.552$	-1.028.790	-0.04779	0.3288	0.744962	-0.24139
Sulawesi Utara	$\hat{Y}=-12.289.920$	-1.030.516	-0.05257	0.331766	0.776651	-0.18892
Sulawesi Tengah	$\hat{Y}=-11.865.389$	-1.030.010	-0.05029	0.329834	0.759284	-0.21549
Sulawesi Selatan	$\hat{Y}=-11.731.150$	-1.029.859	-0.04954	0.329306	0.753548	-0.22426
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y}=-12.095.959$	-1.028.575	-0.05035	0.331195	0.769386	-0.20796
Gorontalo	$\hat{Y}=-12.094.820$	-1.030.394	-0.05164	0.330797	0.768775	-0.20033
Maluku	$\hat{Y}=-13.055.664$	-1.032.741	-0.05601	0.33644	0.804916	-0.14674
Maluku Utara	$\hat{Y}=-12.660.253$	-1.031.865	-0.05475	0.333725	0.790594	-0.16526
Papua Barat	$\hat{Y}=-13.085.212$	-1.035.700	-0.05759	0.336407	0.804787	-0.13709
Papua	$\hat{Y}=-14.027.901$	-1.065.660	-0.06436	0.34608	0.825238	-0.07682
$\hat{Y}_{\text{Papua}} = - 14.027.901 - 1.065.660 - 0.06436 + 0.34608 + 0.825238 - 0.07682$						



Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 45.3823 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar -14.027.901 persen yang artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik sebesar 14.027.901 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai -1.065.660 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 1.065.660 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai -0.06436 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.06436 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai 0.34608 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.34608 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 0.825238 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.825238 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai -0.07682 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GDPBRB ADHK, maka akan

menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.07682 persen.

**abel 5. 41 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2015**

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y} = 1.817.328$	-0.598362	-0.13894	0.068208	0.726048	-0.20154
Sumatera Utara	$\hat{Y} = -13.146.796$	2.039.006	-0.14184	0.268562	0.960973	-0.41174
Sumatera Barat	$\hat{Y} = 1.004.027$	-0.565129	-0.12985	0.072294	0.731354	-0.16077
Riau	$\hat{Y} = -0.009208$	-0.430593	-0.115	0.073873	0.733847	-0.08615
Jambi	$\hat{Y} = 0.730089$	-0.529374	-0.12601	0.072863	0.732066	-0.1414
Sumatera Selatan	$\hat{Y} = 0.477534$	-0.491222	-0.12221	0.073145	0.732486	-0.12196
Bengkulu	$\hat{Y} = 0.829149$	-0.519861	-0.12674	0.071973	0.730845	-0.14357
Lampung	$\hat{Y} = 0.402946$	-0.46826	-0.12068	0.072822	0.732104	-0.11343
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y} = 0.151096$	-0.479931	-0.1184	0.074664	0.734668	-0.10503
Kepulauan Riau	$\hat{Y} = 0.37386$	-0.508432	-0.12166	0.074308	0.73408	-0.12134
Jawa Barat	$\hat{Y} = 0.099968$	-0.42969	-0.11614	0.073229	0.732915	-0.09084
Jawa Tengah	$\hat{Y} = -0.28032$	-0.396552	-0.1108	0.074121	0.734611	-0.06536
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y} = -0.148829$	-0.394155	-0.11215	0.073318	0.733427	-0.07079
Jawa Timur	$\hat{Y} = -0.772044$	-0.357791	-0.10375	0.075184	0.73705	-0.0322
Banten	$\hat{Y} = 0.252517$	-0.446818	-0.11837	0.072961	0.732407	-0.10176
Bali	$\hat{Y} = -0.96236$	-0.337703	-0.1007	0.075298	0.737821	-0.01755
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y} = -1.277.461$	-0.321202	-0.09625	0.076077	0.739852	0.002608
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y} = -1.987.516$	-0.26843	-0.08477	0.07653	0.744268	0.055314
Kalimantan Barat	$\hat{Y} = -0.415051$	-0.453428	-0.1114	0.076923	0.738171	-0.0733
Kalimantan Tengah	$\hat{Y} = -1.054.275$	-0.391181	-0.10189	0.077938	0.740829	-0.02763
Kalimantan Selatan	$\hat{Y} = -1.102.352$	-0.379489	-0.10085	0.077708	0.740745	-0.0222
Kalimantan Timur	$\hat{Y} = -1.555.665$	-0.376266	-0.09539	0.079739	0.744498	0.000835
Kalimantan Utara	$\hat{Y} = -1.523.543$	-0.354928	-0.09484	0.078679	0.743351	0.005237
Sulawesi Utara	$\hat{Y} = -2.548.331$	-0.32842	-0.08068	0.081623	0.751729	0.066362
Sulawesi Tengah	$\hat{Y} = -2.080.602$	-0.349526	-0.08776	0.080852	0.7481	0.035113
Sulawesi Selatan	$\hat{Y} = -1.912.411$	-0.356214	-0.09016	0.080453	0.746838	0.02449
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y} = -2.117.372$	-0.314796	-0.08556	0.07935	0.747143	0.04758
Gorontalo	$\hat{Y} = -2.364.254$	-0.34012	-0.08369	0.081527	0.750379	0.052837
Maluku	$\hat{Y} = -3.113.979$	-0.280508	-0.07013	0.080724	0.756226	0.114075
Maluku Utara	$\hat{Y} = -2.940.877$	-0.315325	-0.07467	0.082222	0.755266	0.092267
Papua Barat	$\hat{Y} = -3.392.172$	-0.306599	-0.06777	0.082943	0.76001	0.121071
Papua	$\hat{Y} = -4.219.331$	-0.276522	-0.05338	0.082594	0.770995	0.180381
$\hat{Y}_{\text{Papua}} = -4.219.331 - 0.276522 - 0.05338 + 0.082594 + 0.770995 + 0.180381$						



Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 36.53 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar - 4.219.331 persen yang artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik sebesar 4.219.331 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai -0.276522 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.276522 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai -0.05338 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan menurunkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.05338 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai 0.082594 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.082594 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 0.770995 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.770995 persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai 0.180381 yang berarti dengan meningkatnya

pertumbuhan GDPRB ADHK, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.180381 persen.

**Tabel 5. 42 Model GWR di Wilayah Kota Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2020**

Provinsi	Model Regresi					
Aceh	$\hat{Y} = 3.083.673$	0.04998	0.231236	-0.926424	0.358252	0.377948
Sumatera Utara	$\hat{Y} = -7.279.562$	-0.000294	-0.03608	0.841881	1.068.462	0.217165
Sumatera Barat	$\hat{Y} = 65.269.959$	0.04808	0.222619	-0.959197	0.387231	0.378966
Riau	$\hat{Y} = 65.871.650$	0.044599	0.207179	-0.96995	0.444317	0.375795
Jambi	$\hat{Y} = 65.431.191$	0.047225	0.218717	-0.962047	0.401534	0.378081
Sumatera Selatan	$\hat{Y} = 65.466.332$	0.046347	0.214763	-0.963079	0.416271	0.377058
Bengkulu	$\hat{Y} = 64.830.838$	0.047389	0.219327	-0.953279	0.40003	0.377312
Lampung	$\hat{Y} = 65.199.523$	0.045985	0.213081	-0.959443	0.422939	0.37623
Kepulauan Bangka Belitung	$\hat{Y} = 66.438.458$	0.045443	0.211005	-0.977646	0.429157	0.377521
Kepulauan Riau	$\hat{Y} = 66.274.103$	0.046224	0.214415	-0.974817	0.416562	0.378176
Jawa Barat	$\hat{Y} = 65.432.560$	0.044883	0.208291	-0.963451	0.440694	0.375429
Jawa Tengah	$\hat{Y} = 66.104.300$	0.043527	0.202647	-0.973917	0.461199	0.375136
Daerah Istimewa Yogyakarta	$\hat{Y} = 65.541.122$	0.043874	0.20397	-0.965596	0.456929	0.374649
Jawa Timur	$\hat{Y} = 67.092.169$	0.041643	0.195059	-0.98921	0.488841	0.374955
Banten	$\hat{Y} = 65.259.107$	0.045429	0.210636	-0.960631	0.43207	0.375723
Bali	$\hat{Y} = 67.356.856$	0.040793	0.191657	-0.993486	0.501525	0.374697
Nusa Tenggara Barat	$\hat{Y} = 68.201.690$	0.039516	0.186777	-1.006.348	0.519179	0.374918
Nusa Tenggara Timur	$\hat{Y} = 69.699.241$	0.036007	0.173544	-1.029.706	0.568236	0.374861
Kalimantan Barat	$\hat{Y} = 67.993.894$	0.043702	0.203923	-1.001.102	0.454013	0.377947
Kalimantan Tengah	$\hat{Y} = 69.015.069$	0.04115	0.193627	-1.017.239	0.491979	0.377031
Kalimantan Selatan	$\hat{Y} = 68.922.717$	0.040857	0.192405	-1.016.059	0.496751	0.376689
Kalimantan Timur	$\hat{Y} = 70.669.035$	0.03931	0.186761	-1.042.095	0.516419	0.37767
Kalimantan Utara	$\hat{Y} = 70.012.393$	0.039129	0.185827	-1.032.696	0.520704	0.376786
Sulawesi Utara	$\hat{Y} = 73.502.189$	0.034764	0.170205	-1.085.254	0.577125	0.378044
Sulawesi Tengah	$\hat{Y} = 72.141.243$	0.037015	0.178288	-1.064.516	0.547414	0.377842
Sulawesi Selatan	$\hat{Y} = 71.622.840$	0.037752	0.180961	-1.056.661	0.537669	0.377724
Sulawesi Tenggara	$\hat{Y} = 71.405.556$	0.036297	0.175265	-1.054.221	0.559755	0.376704
Gorontalo	$\hat{Y} = 73.059.617$	0.03574	0.173735	-1.078.403	0.564005	0.378088
Maluku	$\hat{Y} = 74.368.002$	0.031124	0.157031	-1.099.321	0.626468	0.377531
Maluku Utara	$\hat{Y} = 74.717.189$	0.032753	0.163172	-1.103.716	0.602928	0.378315
Papua Barat	$\hat{Y} = 76.177.700$	0.030331	0.154887	-1.125.833	0.633081	0.378729
Papua	$\hat{Y} = 77.339.586$	0.024673	0.135032	-1.144.322	0.70366	0.378626
$\hat{Y}_{Papua} = 77.339.586 + 0.024673 + 0.135032 - 1.144.322 + 0.70366 + 0.378626$						



Berdasarkan model persamaan regresi diatas dengan nilai  $R^2$  sebesar 35.1963 persen dapat diketahui bahwa nilai intersep sebesar 77.339.586 persen yang artinya jika jumlah Bantuan Sosial (X1), Belanja Modal (X2), Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Atas Dasar Harga Konstan (X5) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua naik sebesar 77.339.586 persen. Koefisien regresi Bantuan Sosial (X1) bernilai 0.024673 yang berarti dengan meningkatnya Bantuan Sosial sebesar satu persen, maka akan meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.024673 persen. Sedangkan Belanja Modal (X2) bernilai 0.135032 yang berarti dengan meningkatnya Belanja modal sebesar satu persen maka akan meningkatkan jumlah Persentase Penduduk Miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.135032 persen. Kemudian untuk koefisien Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X3) bernilai -1.144.322 yang berarti dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA, maka akan menurunkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 1.144.322 persen. Dan koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) bernilai 0.70366 yang berarti dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.70366persen serta koefisien pertumbuhan GPRB menurut ADHK (X5) bernilai 0.378626 yang berarti dengan meningkatnya pertumbuhan GDPRB ADHK, maka akan meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Provinsi Papua sebesar 0.378626 pe



# 6

## DETERMINASI PENDUDUK MISKIN DESA DAN KOTA DI INDONESIA

### 6.1 Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 27.619.662 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6.145.146 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 6.145.146 persen. Artinya Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi termiskin Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha;1,df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin. Pada tahun 2015 variabel Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai koefisien sebesar 23.452645 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $672.917 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ .



Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 23.452645 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 672.917 persen. Artinya Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi termiskin Indonesia pada tahun 2015. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; l, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2020 variabel Belanja Bantuan Sosial juga berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini bisa kita lihat dari  $F_{hitung}$  sebesar  $6.321561 > F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan landasan teori tentang dampak belanja bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan. Menurut LKPD 2015-2019, kemiskinan disebabkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang rata-rata kurang dari 1 persen dari total belanja daerah, dan cenderung tidak konsisten atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini juga disebabkan belum terealisasinya belanja bantuan sosial atau kurangnya penyerapan anggaran. Belanja bantuan sosial gagal terwujud karena pemerintah pusat dan provinsi melakukan berbagai program jaminan kesehatan dan jaminan sosial, sehingga mengurangi belanja bansos yang harus diberikan kepada masyarakat.



Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181.952 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $-0.021837 < F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181.952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar -0.021837 persen. Artinya Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hitung} > F_{\alpha;1,df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2015 Belanja Bantuan Sosial di wilayah perkotaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  diterima karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.102434 < F_{0,05;6;26}(2.490)$ . Artinya variabel Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hasil penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan Sendouw et al (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh pada kemiskinan. Menurut Sendouw et al (2017) menyatakan bahwa “belanja bantuan sosial yang disediakan pemerintah terhadap penduduk miskin di Kota Manado gagal meningkatkan taraf hidup orang miskin di Manado”.



Menurut Firmansyah (2019) mencontohkan, bahwa penyaluran bantuan sosial tidak mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan manfaat dan dampak yang diterima sangat rendah dan tidak dapat membantu masyarakat kurang mampu keluar dari garis kemiskinan, faktor lainnya adalah sulitnya pemerintah daerah mengidentifikasi masyarakat miskin dan ketepatan penerima bantuan sosial.

Pemerintah tetap harus menjaga belanja bantuan sosial ini meski tidak mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Bantuan sosial tetap perlu disalurkan guna membangun jaring pengaman sosial dan mengurangi kemiskinan ketika masalah sosial muncul atau kenaikan tajam tingkat kemiskinan, seperti di masa pandemi Covid-19. Menurut Kepala BPS Suhariyanto yang dilansir dalam media ekonomi.bisnis.com, mengatakan bahwa program bantuan sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19 dapat meringankan angka kemiskinan. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, karena adanya penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah ini, peningkatan penduduk miskin tidak setinggi yang diperkirakan.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2020 bahwa variabel Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai koefisien sebesar 67.831969 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $2.678 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Bantuan Sosial terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja Bantuan Sosial memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase



penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Bantuan Sosial sebesar 2.678 persen. Artinya Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.

Hasil penelitian ini selaras dengan (Sumiarti, 2022) yang mengatakan bahwa variabel belanja bantuan sosial secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun dengan koefisien yang bertanda positif. Secara ekonomi, tanda positif dari koefisien belanja bantuan sosial memperlihatkan bahwa kenaikan belanja bantuan sosial 40 mengakibatkan pada kemiskinan yang meningkat. Hasil ini juga berarti bahwa belanja bantuan sosial di 33 provinsi di Indonesia gagal menurunkan kemiskinan.

Belanja bantuan sosial menjadi salah satu komponen belanja pemerintah tidak langsung berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, belanja bantuan sosial hanya sebagian kecil dari total belanja yang diperuntukkan. Bahkan, beberapa daerah tidak menyediakan anggaran belanja sosial pada tahun anggaran tertentu. APBD provinsi yang kecil dan parsial telah menyebabkan fakta bahwa peran pengeluaran ini dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia belum terlihat.



## **6.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Belanja Modal pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 27.619.662 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6.009 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Hal ini menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Modal sebesar 6.009 persen. Artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hitung} > F_{\alpha; l, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin di tahun 2010.

Pada Tahun 2015 Belanja Modal di wilayah perdesaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $15.144 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Begitupun yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel *Fixed Gaussian* menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 2.905.096 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $13.280 > F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin.



Hal ini menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 2.905.096 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Modal sebesar 13.280 persen. Artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; l, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2022) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi namun memiliki pengaruh positif yang artinya peningkatan belanja modal justru mendorong peningkatan kemiskinan, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwasanya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.

Belanja modal merupakan alokasi dari belanja pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan jumlah aset yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Adapun bentuk aset tersebut yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan



pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Tentunya belanja ini akan memberikan kemudahan akses baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun sosial masyarakat. Sehingga, semakin meningkat belanja modal akan mendorong peningkatan infrastruktur sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Belanja modal tentunya bukan belanja yang difokuskan untuk memberantas kemiskinan akan tetapi melalui alokasi belanja modal diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong upaya peningkatan produktivitas selanjutnya dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Belanja Modal pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181.952 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $1.860 < F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181.952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Modal sebesar 1.860 persen. Artinya Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha;1,df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin.





Hasil penelitian ini selaras dengan temuan yang dilakukan oleh (Sumiarti, 2022) yang menjelaskan bahwa variabel belanja modal secara statistik tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Belanja modal menjadi salah satu jenis belanja langsung yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk ke dalam kelompok belanja modal adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masamfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pemanfaatan belanja langsung bisa dalam bentuk belanja modal untuk jalan, irigasi dan bangunan lainnya. Dalampraktek, dampak belanja modal dalam bentuk aset tetap belum terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum bisa terlihat dalam jangka pendek atau pada tahun yang bersangkutan. Dampak kebijakan memerlukan waktu yang cukup (jangka menengah atau jangka panjang. Kesimpulan yang sama juga terjaditerhadap vaabel tingkat pengangguran terbuka.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Londa, 2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurmansyah, 2016) dan penelitian yang dilakukan (Kamaliah, 2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.



Pada Tahun 2015 variabel Belanja Modal di wilayah perkotaan berbeda dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6.823 > F_{0,05;6;26}(2.490)$ . Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal serupa juga terjadi di tahun 2020 dengan hasil regresi menyatakan bahwa variabel Belanja Modal menunjukkan nilai koefisien sebesar  $67.831969$  serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $10.960929 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Belanja Modal memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak  $67.831969$  persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Belanja Modal sebesar  $10.960929$  persen. Artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.

### **6.3 Pengaruh Angka Partisipasi Murni SMA/MA Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Angka Partisipasi Murni SMA/MA pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar  $27.619.662$  serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $17.473853 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Hal ini menunjukkan jika Angka Partisipasi Murni SMA/MA memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan



mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 17.473853 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; 1, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin di tahun 2010.

Pada Tahun 2015 Angka Partipasi Murni SMA/MA di wilayah perdesaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $100.265739 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Artinya variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin. Begitupun yang terjadi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel *Fixed Gaussian* menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 2.905.096 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $157.868732 > F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni SMA/MA memiliki maknasetiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 2.905.096 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 157.868732 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh



Provinsi Indonesia tahun 2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; 1, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.

Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181.952 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $-8.194010 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka ada pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni SMA/MA memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181.952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 8.194010 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; 1, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2015 Angka Partipasi Murni SMA/MA di wilayah perkotaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $21.208677 > F_{0,05;6;26}(2.490)$ . Artinya variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk



Miskin. Begitupun yang terjadi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2020 hasil regresi menggunakan pembobot kernel *Fixed Gaussisan* menyatakan bahwa nilai koefisien sebesar 67.831969 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6.989732 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Angka Partipasi Murni SMA/MA memiliki maknasetiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Angka Partipasi Murni SMA/MA sebesar 6.989732 persen. Artinya Angka Partipasi Murni SMA/MA berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; l, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Angka Partipasi Murni SMA/MA terhadap Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020.

Dari penjelasan di atas bahwa variabel Angka Partisipasi Murni SMA/MA yang terjadi di wilayah perdesaan maupun perkotaan yaitu sama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walewangko, 2022) yang menjelaskan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado menandakan bahwa Jika angka partisipasi murni sesuai jenjang pendidikan dalam hal ini SMA/MA/Sedejarat naik maka tingkat kemiskinan naik karena berpengaruh positif. Hal ini berbanding



terbalik dengan teori yang seharusnya negatif sesuai dengan teori Becker (1975) yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan aset modal manusia yang sangat berarti pendidikan ini dapat diartikan sebagai investasi yang dapat menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asnawi (2019) dia meneliti mengenai APM sesuai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat pada 33 Provinsi di Indonesia dengan hasil angka partisipasi murni (APM) berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi APM maka semakin kecil pengaruhnya terhadap persentase penduduk miskin.

Begitu juga dengan penelitian oleh Pranizty dan Septiani (2021) dengan objek penelitian 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan hasil penelitian APM sesuai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya adalah pengaruh APM tingkat SMA terhadap tingkat kemiskinan itu positif dan signifikan. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan usianya sedangkan kemungkinan besar masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk menempuh pendidikan sehingga APM yang tinggi belum tentu akan menurunkan tingkat kemiskinan.



#### **6.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 27.619662 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.334246 < F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.334246 persen.

Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; l, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ebunoluwa & Yusuf, 2018) yang menjelaskan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara statistik tidak signifikan memengaruhi kemiskinan. Dalam beberapa studi variabel TPT juga tidak signifikan mempengaruhi atau justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pengangguran mungkin menjadi salah satu penyebab kemiskinan,



tetapi kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh pengangguran. Namun, sebagian studi lainnya menemukan bahwa variabel TPT dengan kemiskinan berhubungan secara positif. Dalam kasus ini maka pemerintah dapat mengupayakan penciptaan lapangan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, serta berfokus kepada sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan industri agar dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia (Ebunoluwa & Yusuf, 2018).

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai koefisien sebesar 23.452645 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $8.048300 > F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 23.452645 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8.048300 persen. Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015.

Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perdesaan juga sama halnya dengan tahun 2015 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $6.353928 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Artinya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.





Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2022) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran terbuka bertambah, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Variabel ini menjelaskan Koefisien regresi sebesar 1,785 berarti jika tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 1,785 persen. Oleh karena itu, perlu adanya program pemerintah untuk membantu mereka yang tidak mampu mencari pekerjaan dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran publik dan meningkatkan keterampilan para pengangguran untuk bekerja dengan dunia usaha.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi di bidang perhotelan atau perhotelan, sehingga pemerintah perlu mengadakan kegiatan pelatihan terkait pekerjaan di bidang pariwisata. Program pemerintah tentu dapat membantu mempercepat penerimaan pengangguran tanpa kualifikasi khusus. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas dan mengurangi jumlah pengangguran. Organisasi perekrutan juga perlu lebih sering terjadi tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil di Bali. Ini membantu para penganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Program pemerintah yang semakin terbuka untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka akan dengan mudah menyelesaikan masalah kemiskinan di Bali.



Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181952 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $41.127031 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 41.127031 persen.

Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha;1,df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Walewangko, 2022) menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado menandakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Semakin tinggi angka pengangguran maka akan semakin tinggi juga tingkat kemiskinan di Kota Manado, hal ini sama seperti teori yang menyebutkan bahwa ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga akan



meningkat dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga akan menurun.

Dalam teori selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah miskin. Hal ini diperkuat oleh penelitian Oratmangun, Kalangi dan Naukoko (2021) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara mendapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini dimana variabel pengangguran positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak mempunyai pendapatan.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai koefisien sebesar 13.409502 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.857377 < F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 13.409502 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.857377 persen. Artinya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015.



Hasil penelitian yang terjadi di wilayah perkotaan tahun 2015 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2022) yang menyatakan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Dengan nilai koefisien positif artinya bahwa setiap kenaikan angka pengangguran terbuka maka akan diikuti dengan peningkatan pada jumlah penduduk miskin. Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan bervariasi sehingga setiap individu yang memasuki usia kerja harus berusaha memenuhinya dengan cara bekerja agar mendapat pemasukan dan pendapatan. Tingkat pengangguran yang naik maka pendapatan turun sehingga akan menyulitkan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya akan mengurangi daya beli, produksi dan konsumsi, hal ini akan menurunkan kesejahteraan dan standar hidup layak sehingga dapat meningkatkan kemiskinan.

Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah perkotaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $11.687457 > F_{0,05;6;26}(2.490)$ . Artinya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.



## **6.5 Pengaruh Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Desa dan Kota Seluruh Provinsi Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 27.619.662 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $5.164290 > F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 27.619.662 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK sebesar 5.164290 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi termiskin Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa apabila nilai  $F_{hitung} > F_{\alpha;1,df_2}$  maka  $H_0$  ditolak maka terdapat pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin di tahun 2010.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumual, 2016) menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menerangkan variabel tidak bebas yaitu tingkat kemiskinan. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lebih baik, perlu ditingkatkan



secara berkesinambungan sehingga tingkat kemiskinan di Kota Manado menurun pada setiap tahun. Pihak pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai skala prioritas dalam upaya menanggulangi tingkat kemiskinan di Kota Manado, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai upaya mendorong jumlah penduduk miskin di Kota Manado, khususnya dalam memastikan dan mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja terutama dari sektor modern seperti jasa yang padat modal.

Distribusi yang adil dan merata dari hasil Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan berdampak pada terciptanya pembangunan di segala sektor lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Kurangnya Produk akan berdampak pada kesejahteraan pada masalah-masalah sosial lainnya dari tingkat kemiskinan. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Manado. Syarat kecukupannya adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan PDRB harus menyebar di setiap golongan, termasuk di golongan penduduk miskin di Kota Manado. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB di setiap sektor lapangan usaha sangatlah penting dalam mengurangi dan menanggulangi tingkat kemiskinan di Kota Manado. Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK menunjukkan nilai koefisien sebesar 23.452645 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar



$1.336897 < F_{0,05;6;27}(2.474)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 23.452645 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK sebesar 1.336897 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2015. Pada Tahun 2020 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perdesaan juga sama halnya dengan tahun 2015 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $1.818653 < F_{0,05;6;27}(2.474)$ . Artinya variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Sedangkan hasil uji regresi di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia dengan menggunakan fungsi pembobot *Kernel Fixed Gaussian*, variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK pada tahun 2010 menunjukkan nilai koefisien sebesar 30.181952 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $3.629608 > F_{0,05;6;26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  ditolak maka ada pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 30.181952 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK



sebesar 3.6296608 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2010. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan apabila nilai  $F_{hit} > F_{\alpha; 1, df_2}$  maka  $H_0$  ditolak dan terdapat pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2015 Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK di wilayah perkotaan juga sama halnya dengan tahun 2010 yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $2.875.751 > F_{0,05; 6; 26}(2.490)$ . Artinya variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK berpengaruh signifikan terhadap Persentase Penduduk Miskin.

Namun, berbeda dengan hasil regresi pada tahun 2015 bahwa variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK menunjukkan nilai koefisien sebesar 67.831969 serta nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.173211 < F_{0,05; 6; 26}(2.490)$  yang artinya  $H_0$  diterima maka tidak ada pengaruh variabel Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK terhadap Persentase Penduduk Miskin. Hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK memiliki makna setiap perubahan nilai sebesar 1 persen maka akan mempengaruhi angka persentase penduduk miskin sebanyak 67.831969 persen dan jika seluruh variabel dianggap konstan akan diperoleh nilai Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK sebesar 0.173211 persen. Artinya Pertumbuhan PDRB Menurut ADHK tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan seluruh Provinsi Indonesia tahun 2020.





## DAFTAR PUSTAKA

- A., C. (2004). Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia. *Bagaimana Kemiskinan Diukur?: Beberapa Model Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia*, 1–8. <https://doi.org/10.17528/cifor/001641>
- Amalia, E., & Sari, L. K. (2019). Analisis Spasial Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2017. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 3(3), 202–215. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v3i3.240>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Apriliawan, Dody. 2013. *Pemodelan Laju Inflasi Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel*. Skripsi Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNDIP Semarang.
- BPS. (2020). Kemiskinan makro indonesia. *Bps*, 1–74.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). Penguatan Tenaga Pendidik: Upaya Meminimalisir Problematika Pendidikan Nasional. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Cahyat, Ade. Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia. *Center For International Forestry Research*. November 2004, Number 2.
- C. Suryawati. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: FKM Universitas Diponegoro.
- Erf, T., Paper, W., Papers, T. W., Papers, W., & St, B. H. (1998). *THE DETERMINATES OF URBAN AND RURAL POVERTY IN Samir Ghazouani and Mohamed Goaid RURAL POVERTY IN TUNISIA Samir Ghazouani and Mohamed Goaid*. 202.
- Fahmi, P. (2022). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Bengkulu Tahun 2011-. 5*.



- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.  
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hakim, A. R., Yasin, H., & Suparti, S. (2015). Pemodelan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Dengan Pendekatan Mixed Geographically Weighted Regression. *Jurnal Gaussian*, 3(4), 575–584.  
<http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/8068%5Cnhttp://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/download/8068/7848>
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1064–1077.
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>
- Issn, P., & Yovita, I. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol . 11 No . 1 Juli 2022  
*E - ISSN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2002-2021*. 11(1).
- Jasim Al-Ahbaby, N., Jafer Al-Faloji, S., Hazim Al-Badri, B., & K. Hassan, T. (2021). an Economic Study To Measure the Impact of the Main Variables on Rural Poverty in Iraq for the Period 1990-2019. *Plant Archives*, 21(Suppliment-1), 891–895.  
<https://doi.org/10.51470/plantarchives.2021.v21.s1.138>
- Kinarsih, & Abdullah, F. (2020). Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ). *Jurnal Ilmua Ekonomi (JIE)*, 4(2), 339–353.
- Kisiala, W., & Račka, I. (2021). Spatial and statistical analysis of urban poverty for sustainable city development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(2), 1–18.  
<https://doi.org/10.3390/su13020858>
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori*,



- Laborde, D., Martin, W., & Vos, R. (2021). Impacts of COVID-19 on global poverty, food security, and diets: Insights from global model scenario analysis. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 52(3), 375–390. <https://doi.org/10.1111/agec.12624>
- Lendentariang, D., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 23–34.
- Mankiw, N.G. 2006. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Erlangga: Jakarta.
- Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Masruroh. (2020). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 08(01), 46–58. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i1.84>
- Merdekawati, I.P. dan I.N. Budiantara. 2013. *Pemodelan Regresi Spline Truncated Multivariabel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Sains dan Seni Pomits, Vol 2, No 1, 2337-3520 (2301-928X Print).
- Munika, T., Pramoedyo, H., & Fitriani, R. (2014). Pemodelan Geographically Weighted Regression dengan Pembobot Fixed Gaussian Kernel pada Data Spasial ( Studi Kasus Ketahanan Pangan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan ). *Natural*, 2(3), 296–302.
- Mulyani, S., Andriyana, Y., & Sudartianto. (2017). Modeling the human development index and the percentage of poor people using quantile smoothing splines. *AIP Conference Proceedings*, 1827, 1–11. <https://doi.org/10.1063/1.4979423>
- Nadya, M., Rahayu, W., & Santi, V. M. (2017). Analisis Geographically Weighted Regression (Gwr) Pada Kasus Pneumonia Balita Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21009/jsa.01103>



- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLIDAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5300–5306.
- Nurkhalizah, S., Rochmani, S., & Septimar, Z. M. (2021). Nusantara Hasana Journal. *Nusantara Hasana Journal*, 1(1), 95–101.
- Patel. (2019). 濟無 *No Title No Title No Title*. 22(6), 9–25.
- Penilaian, S., Pada, P., Belajar, H., & Salatiga, N. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i3.42413>
- Pratama, A. D., Suparta, I. W., & Ciptawaty, U. (2021). Spatial Autoregressive Model and Spatial Patterns of Poverty In Lampung Province. *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 16(1), 14–28. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1776>
- Prayanti, Tyas Ayu. 2015. *Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbukakabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Jurusan Statistika FMIPA UNDIP Semarang.
- Pratama, R., Kusnandar, D., & Rizki, S. W. (2018). Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto. *Buletin Ilmiah Math. Stat. Dan Terapannya (Bimaster)*, 07(1), 23–33.
- Putri, D. S. (2021). Jurnal Revolusi Indonesia. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2(1), 21–30.
- Pynanjung, P. A., Agustinus, E., Junaidi, J., Burhansyah, R., & Oktoriana, S. (2021). Poverty in the Indonesia-Malaysia border province (case study in West Kalimantan Province). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(5), 401–412. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i5.12760>



- Riyani, Lupi. 2014. Analisis Faktor- Faktor Yang Mrmpengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 1991-2011. Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 71–79. <https://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/36/96>
- Samuel, D. A. (2021). Analysis of the Impact of Education on Poverty Reduction and Economic Development in Nigeria. *European Journal of Business and Management, January 2022*. <https://doi.org/10.7176/ejbm/13-23-03>
- Santosa, Budi Purbayu dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft. Axcel& SPSS*. Yogyakarta.
- Sayogyo. 2000. *Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan*. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi-Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Persada: Jakarta.
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanj Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 28–43. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/srikandi/article/view/1547>
- Sumodiningrat, G. 1994. Pengantar ekonometrika. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sousa-brown, S. C. B. De. (2004). *an Empirical Analysis of Poverty and Income an Empirical Analysis of Poverty and Income*.
- .Tripena, Agustini. 2011. *Penentuan Model Regresi Spline Terbaik*. Prosiding Seminar Nasional Statistika UNDIP ISBN: 978-979-097-124-4
- Putri, D. S. (2021). Jurnal Revolusi Indonesia. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2(1), 21–30.



- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 71–79.  
<https://ulilalbabinstitute.com/index.php/PESHUM/article/view/36/96>
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanj Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 28–43.  
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/srikandi/article/view/1547>
- Wati, D. C., & Utami, H. (2020). Model Geographically Weighted Panel Regression (Gwpr) Dengan Fungsi Kernel Fixed Gaussian Pada Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Jurnal Matematika Thales*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.22146/jmt.49230>

## IDENTITAS PENULIS

### **Mardalena, S.E, M.Si.**



dilahirkan di Muara Enim, tanggal 21 April tahun 1978. Menjadi dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Univesitas Sriwijaya tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Univesitas Sriwijaya tahun 2000, pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2004.

Penulis pernah menjadi tenaga ahli program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Mata Kuliah yang diampuh antara lain: Teori Ekonomi Mikro, Teori Ekonomi Makro, Ilmu Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan.

Publikasi artikel ilmiah dan buku dua tahun terakhir diantaranya : Tahun 2023, *The welfare impact of village fund allocation in Indonesia: The comparative of Java and Non-Java*; <https://dx.doi.org/10.12928/optimum.v13i2.8668>. Tahun 2023 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi; <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe/article/view/4702>. Tahun 2023, Pengembangan Program Kegiatan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2023-2028 Desa Ulak Kembahang II; <http://jurnal.utu.ac.id/baktiku/article/view/7288>. Tahun 2023, Strategi Manajemen Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan dan Inovasi Pupuk Komersial di Desa Ulak Kembahang II; <https://ejournal.unib.ac.id/kreativasi/article/view/31844>. Tahun 2022, *Spending Allocation, Capacity and Village-Owned Enterprises: Does it Matter to Village Income in Indonesia?*; <https://ijimes.ir/index.php/ijimes/article/view/39>. Tahun 2023, Dampak Pandemi Covid 19 Bagi Perekonomian Indonesia; ISBN : 978- 623-399-115-5, Penerbit UNSRI PRESS. Kajian Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Valuta Asing Terhadap Nilai Tukar Di Kelompok Negara Berpendapatan Rendah, Menengah Ke Bawah, Menengah Ke Atas Dan Berpendapatan Tinggi; Penerbit UNSRI PRESS, ISBN : 978-623-399-021-9 Di Terbitkan Tahun 2021, <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/64255>. Kajian Pola Migrasi, Konsumsi, dan Saving MASYARAKAT BERPENDHASILANRENDAH (MBR) Pada Kawasan Kumuh di Kota Palembang. Penerbit UNSRI PRESS, ISBN : 978-979-587-996-1, diterbitkan Tahun 2021, <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/57187>.

## IDENTITAS PENULIS



### **Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.**

dilahirkan di Palembang, tanggal 14 Maret tahun 1969. Menjadi dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya sejak tahun 1996. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya tahun 1993, pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya tahun 2009, pendidikan doktoral (S3) Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya tahun 2013. Penulis aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palembang periode 2022-2025 dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan periode 2022-2027.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya berjudul *Dinamika Ketersediaan Infrastruktur dan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan* tahun 2018. *Reduksi Kemiskinan Melalui Belanja Bantuan Sosial, bantuan Modal dan PAD pada kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan* (sebagai Ketua), penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. *Pengaruh Angka Kelangsungan Hidup, Fertilitas, pengeluaran Kesehatan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Negara ASEAN* (sebagai anggota), penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. *Analisis Permintaan dan penawaran Dollar Amerika dan Pengaruhnya Terhadap Kurs Negara- Negara di Dunia* (sebagai anggota), penelitian ini dilakukan pada tahun 2020.

Beberapa kajian pengabdian yang telah dilakukan diantaranya berjudul *Pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bersama Masyarakat desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir*, pengabdian ini dilakukan pada tahun 2018. *Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Pemanfaatan Pekarangan untuk Apotik Hidup* (di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir), pengabdian ini dilakukan pada tahun 2019. *Pelatihan pembuatan Abon pepaya untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga*, pengabdian ini dilakukan pada tahun 2020. *Pelatihan Laporan Keuangan Dalam menunjang UMK yang Bankable*, pengabdian ini dilakukan pada tahun 2020.

Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan diantaranya berjudul *The Influence of Leading yang diterbitkan di Journal of Economics. The Influence of Infrastructure, Poverty and Income on Food Security in South Sumatra Province* yang diterbitkan di AFEBI Economic and Finance Review (AEFR). *The Effect of Investment Toward Economic Growth in The Local Economy* yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. *Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province* yang diterbitkan di Society Journal. Penulis juga telah menulis buku yang berjudul *Ketersediaan Infrastruktur, Pendapatan dan Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan*, diterbitkan di UNSRI PRESS. *Dampak Pandemi Covid 19 Bagi Perekonomian Indonesia*; ISBN : 978-623-399-115-5, Penerbit UNSRI PRESS.



## IDENTITAS PENULIS



### **Drs. Harunurrasyid, M.Com.**

dilahirkan di Lingge, tanggal 9 Februari tahun 1960. Menjadi dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya tahun 1988, pendidikan magister (S2) Program Studi Economics, Faculty of Economics UNSW tahun 1996.

Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan beberapa tahun terakhir diantaranya berjudul *Household Rice Consumption Model in Lubuklinggau City, South Sumatera Province* yang diterbitkan di Atlantis Press. *Economic Growth, Social Expenditure, Unemployment, and Inflation: The Impact on Poverty in South Sumatera* yang diterbitkan di SCITEPRESS-Science and Technology Publications tahun 2019. Tahun 2020, *The Economies of Scale and Efficiency of Small-Scale Capture Fisheries in Kurau Village, Central Bangka District*, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsp/article/view/32463>. Tahun 2021, Penguatan Organisasi dan Kelembagaan Ekonomi dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, <https://jscs.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jscs/article/view/63>. Tahun 2022, *Short and Long Term Analysis of Foreign Exchange Rates Based On Income Levels*, <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1059155>. Tahun 2022, *The COVID-19 Pandemic: What Factors can Affect BUMN20 Stock Return in Indonesia?*, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/17926>. Tahun 2023, *The welfare impact of village fund allocation in Indonesia: The comparative of Java and Non-Java*. Tahun 2023, *The Relationship Between Financial Development and the Composite Stock Price Index in Emerging Market Countries: A Panel Data Evidence, Organizations and Markets in Emerging Economies (Scopus Q4)*. <https://www.zurnalai.vu.lt/omee/article/view/31957>..

Buku yang ditulis diantaranya adalah *Kajian Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Valuta Asing Terhadap Nilai Tukar Di Kelompok Negara Berpendapatan Rendah, Menengah Ke Bawah, Menengah Ke Atas Dan Berpendapatan Tinggi*; Penerbit UNSRI PRESS, ISBN : 978-623-399-021-9 Di Terbitkan Tahun 2021.

## IDENTITAS PENULIS



### **Diah Ayu Fatmawati, S.E.**

dilahirkan di Palembang, tanggal 16 Mei 2000. Alumni di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya tahun 2022. Penulis terlibat berbagai kegiatan penelitian, dan pengabdian dosen Fakultas Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang ditulis adalah Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Lima Provinsi Termiskin di Indonesia



### **Putri Adelia, S.E.**

dilahirkan di Pulau Panggung, tanggal 9 Oktober tahun 1997. Alumni di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya tahun 2018 dan sedang menempuh pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2023.

Penulis terlibat berbagai kegiatan penelitian, dan penulisan jurnal selama menempuh pendidikan S1 dan S2.

Penulis pernah menjadi sekretaris divisi keilmuan di himpunan mahasiswa jurusan HIMEPA FE UNSRI 2014-2016. Saat ini berprofesi sebagai guru Ekonomi di SMAIT Permata Bunda Bandarlampung. Beberapa penelitian penulis terlibat sebagai anggota diantaranya berjudul Analisis Efisiensi Investasi Industri Pempek Di Kota Palembang, penelitian dilakukan pada tahun 2018. Analisa Proyeksi Kebutuhan Investasi Sektor sektor Unggulan dan Pengaruhnya terhadap Sektor Pemicu Pertumbuhan ekonomi, Peningkatan Pendapatan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan (Pendekatan Input Output Tahun 2014), penelitian dilakukan pada tahun 2017.

Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan diantaranya berjudul Cost Plus Pricing Solusi Penghitungan Harga Jual Produk UMKM Studi Kasus: Permata Bakery Lampung (2024), Cost Plus Pricing as a Sustainable Solution for MSMEs Case Study: Permata Bakery Lampung tahun (2024), Harmonisasi Transformasi Ekonomi Hijau (2024), Lampung di Penghujung 2023: Evaluasi, Prospek Menyambut Tahun Politik (2024), Determinants of Demand for Sharia Housing in Palembang Case Study: Ahad Mandiri Property (2023), Economic Growth, Social Expenditure, Unemployment, and Inflation: The Impact on Poverty in South Sumatera (2019), Economic Growth, Social Expenditure, Unemployment, and Inflation: The Impact on Poverty in South Sumatera (2018), dan The Analysis Of Basic Sector And The Shift Of Economic Structure In South Sumatera Province Year 2011-2016 (2017).